



**MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
SEKTOR KONTRUKSI
SUB SEKTOR PENGEMBANGAN WILAYAH
JABATAN KERJA AHLI MUDA
PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA**

**ANALISIS PARSIAL PERENCANAAN WILAYAH
DAN KOTA**

**KODE UNIT KOMPETENSI:
F45.PW02.018.01**

BUKU INFORMASI



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI**
Jalan Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat – Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan dengan bidang kerjanya. Berbagai upaya ditempuh, baik melalui pendidikan formal, pelatihan secara berjenjang sampai pada tingkat pemagangan di lokasi proyek atau kombinasi antara pelatihan dan pemagangan, sehingga tenaga kerja mampu mewujudkan standar kinerja yang dipersyaratkan di tempat kerja.

Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan salah satu institusi pemerintah yang ditugasi untuk melakukan pembinaan kompetensi, secara bertahap menyusun standar-standar kompetensi kerja yang diperlukan oleh masyarakat jasa konstruksi. Kegiatan penyediaan kompetensi kerja tersebut dimulai dengan analisa kompetensi dalam rangka menyusun suatu standar kompetensi kerja yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi tenaga kerja di bidang jasa konstruksi yang bertugas sesuai jabatan kerjanya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya.

Penyusunan Modul Pelatihan (Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi) untuk jabatan kerja **Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota** mengacu kepada SKKNI Ahli Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota, yang dalam penjabarannya kepada program pelatihan tertuang pada Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK). Penyusunan KPBK dilakukan dengan mengidentifikasi Unit-unit Kompetensi melalui analisis terhadap Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang merupakan dasar rumusan penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan.

Modul ini merupakan salah satu sarana dasar yang digunakan dalam pelatihan sebagai upaya memenuhi kompetensi standar seorang pemangku jabatan kerja seperti tersebut diatas, sehingga dimungkinkan adanya tambahan materi-materi lainnya untuk lebih meningkatkan kompetensi dari standar yang dipersyaratkan setiap jabatan kerja

Penyusunan modul ini melalui beberapa tahapan diantaranya Focus Group Discussion serta Workshop yang melibatkan para nara sumber, praktisi, pemangku jabatan serta stakeholder. Dengan keterbatasan pelibatan stakeholder terkait dalam proses penyusunan modul ini, dan seiring dengan perkembangan dan dinamika teknologi konstruksi kedepan, maka tetap diupayakan penyesuaian dan perbaikan secara berkelanjutan sejalan dengan dilaksanakannya pelatihan dengan menggunakan modul ini dilapangan melalui respon peserta pelatihan, instruktur, asesor serta semua pihak.

Pada kesempatan ini disampaikan banyak terimakasih kepada tim penyusun yang telah mencurahkan segala kemampuannya sehingga dapat menyelesaikan modul ini, serta semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan modul pelatihan ini.

Jakarta, Nopember 2012

PUSAT PEMBINAAN
KOMPETENSI DAN PELATIHAN
KONSTRUKSI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	1
BAB I PENGANTAR	2
1.1 Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK).....	2
1.2 Penjelasan Materi Pelatihan.....	2
1.3 Pengakuan Kompetensi Terkini	3
1.4 Pengertian-pengertian / Istilah	4
BAB II STANDAR KOMPETENSI	6
2.1 Peta Paket Pelatihan	6
2.2 Pengertian Unit Standar Kompetensi	6
2.3 Unit Kompetensi yang Dipelajari	7
BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN	14
3.1 Strategi Pelatihan	14
3.2 Metode Pelatihan	15
3.3 Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan	15
BAB IV ANALISIS PARSIAL PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	67
4.1 Umum	67
4.2 Analisis Kondisi Fisik Wilayah	67
4.3 Analisis Sumber Daya Buatan.....	76
4.4 Analisis Sektoral	83
4.5 Analisis Sosial Budaya	85
4.6 Penyusunan Hasil Rencana	86
4.7 Penyusunan Album Peta.....	34
BAB V SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI	94
5.1 Sumber Daya Manusia	94
5.2 Sumber-sumber Perpustakaan	94
5.3 Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan	95

LAMPIRAN

BAB I

PENGANTAR

1.1 Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)

1.1.1 Pelatihan berbasis kompetensi.

Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

1.1.2 Kompeten ditempat kerja.

Jika seseorang kompeten dalam pekerjaan tertentu, maka yang bersangkutan memiliki seluruh keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang perlu untuk ditampilkan secara efektif di tempat kerja, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

1.2 Penjelasan Materi Pelatihan

1.2.1 Desain materi pelatihan

Materi Pelatihan ini didesain untuk dapat digunakan pada Pelatihan Klasikal dan Pelatihan Individual / mandiri.

- 1) Pelatihan klasikal adalah pelatihan yang disampaikan oleh seorang instruktur.
- 2) Pelatihan individual / mandiri adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh peserta dengan menambahkan unsur-unsur / sumber-sumber yang diperlukan dengan bantuan dari instruktur.

1.2.2 Isi Materi pelatihan

1) Buku Informasi

Buku informasi ini adalah sumber pelatihan untuk instruktur maupun peserta pelatihan.

2) Buku Kerja

Buku kerja ini harus digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencatat setiap pertanyaan dan kegiatan praktek, baik dalam Pelatihan Klasikal maupun Pelatihan Individual / mandiri.

Buku ini diberikan kepada peserta pelatihan dan berisi:

- a. Kegiatan-kegiatan yang akan membantu peserta pelatihan untuk mempelajari dan memahami informasi.
- b. Kegiatan pemeriksaan yang digunakan untuk memonitor pencapaian keterampilan peserta pelatihan.
- c. Kegiatan penilaian untuk menilai kemampuan peserta pelatihan dalam melaksanakan praktek kerja.

3) Buku Penilaian

Buku penilaian ini digunakan oleh instruktur untuk menilai jawaban dan tanggapan peserta pelatihan pada Buku Kerja dan berisi :

- a. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta pelatihan sebagai pernyataan keterampilan.
- b. Metode-metode yang disarankan dalam proses penilaian keterampilan peserta pelatihan.
- c. Sumber-sumber yang digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencapai keterampilan.
- d. Semua jawaban pada setiap pertanyaan yang diisikan pada Buku Kerja.
- e. Petunjuk bagi instruktur untuk menilai setiap kegiatan praktek.
- f. Catatan pencapaian keterampilan peserta pelatihan.

1.2.3 Penerapan materi pelatihan

1) Pada pelatihan klasikal, kewajiban instruktur adalah:

- a. Menyediakan Buku Informasi yang dapat digunakan peserta pelatihan sebagai sumber pelatihan.
- b. Menyediakan salinan Buku Kerja kepada setiap peserta pelatihan.
- c. Menggunakan Buku Informasi sebagai sumber utama dalam penyelenggaraan pelatihan.
- d. Memastikan setiap peserta pelatihan memberikan jawaban / tanggapan dan menuliskan hasil tugas prakteknya pada Buku Kerja.

2) Pada Pelatihan individual / mandiri, kewajiban peserta pelatihan adalah:

- a. Menggunakan Buku Informasi sebagai sumber utama pelatihan.
- b. Menyelesaikan setiap kegiatan yang terdapat pada Buku Kerja.
- c. Memberikan jawaban pada Buku Kerja.
- d. Mengisikan hasil tugas praktek pada Buku Kerja.
- e. Memiliki tanggapan-tanggapan dan hasil penilaian oleh instruktur.

1.3 Pengakuan Kompetensi Terkini

1.3.1 Pengakuan Kompetensi Terkini (Recognition of Current Competency-RCC)

Jika seseorang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk elemen unit kompetensi tertentu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan pengakuan kompetensi terkini, yang berarti tidak akan dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan.

1.3.2. Persyaratan

Untuk mendapatkan pengakuan kompetensi terkini, seseorang harus sudah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, yang diperoleh melalui:

- 1) Bekerja dalam suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sama atau
- 2) Berpartisipasi dalam pelatihan yang mempelajari kompetensi yang sama atau
- 3) Mempunyai pengalaman lainnya yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang sama.

1.4 Pengertian-pengertian / Istilah

1.4.1 Profesi

Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang menuntut sikap, pengetahuan serta keterampilan/keahlian kerja tertentu yang diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja atau penguasaan sekumpulan kompetensi tertentu yang dituntut oleh suatu pekerjaan/jabatan.

1.4.2 Standarisasi

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan serta menerapkan suatu standar tertentu.

1.4.3 Penilaian / Uji Kompetensi

Penilaian atau Uji Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti melalui perencanaan, pelaksanaan dan peninjauan ulang (review) penilaian serta keputusan mengenai apakah kompetensi sudah tercapai dengan membandingkan bukti-bukti yang dikumpulkan terhadap standar yang dipersyaratkan.

1.4.4 Pelatihan

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai suatu kompetensi tertentu dimana materi, metode dan fasilitas pelatihan serta lingkungan belajar yang ada terfokus kepada pencapaian unjuk kerja pada kompetensi yang dipelajari.

1.4.5 Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau sesuai dengan standar unjuk kerja yang ditetapkan.

1.4.6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

1.4.7 Standar Kompetensi

Standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

1.4.8 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4.9 Sertifikat Kompetensi

Adalah pengakuan tertulis atas penguasaan suatu kompetensi tertentu kepada seseorang yang dinyatakan kompeten yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

1.4.10 Sertifikasi Kompetensi

Adalah proses penerbitan sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/ atau internasional.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI

2.1 Peta Paket Pelatihan

Materi Pelatihan ini merupakan bagian dari Paket Pelatihan Jabatan Kerja Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota yaitu sebagai representasi dari Unit Kompetensi Analisis Parsial Perencanaan Wilayah Dan Kota- Kode Unit F45.PW02.018.01, sehingga untuk kualifikasi jabatan kerja tersebut diperlukan pemahaman dan kemampuan mengaplikasikan dari materi pelatihan lainnya, yaitu:

- Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- Penerapan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik
- Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- Persiapan Kebutuhan Data Perencanaan
- Survei Primer dan Sekunder
- Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- Pemeriksaan Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- Evaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- Penyusunan Rencana Parsial Sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota
- Laporan Pekerjaan Perencanaan
- Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
- Kemampuan Teknik Komunikasi

2.2 Pengertian Unit Standar Kompetensi

2.2.1 Unit Kompetensi

Unit kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas / pekerjaan yang akan dilakukan dan merupakan bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja dalam suatu jabatan kerja tertentu.

2.2.2 Unit kompetensi yang akan dipelajari

Salah satu unit kompetensi yang akan dipelajari dalam paket pelatihan ini adalah “Menerapkan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup di tempat kerja”.

2.2.3 Durasi / waktu pelatihan

Pada sistem pelatihan berbasis kompetensi, fokusnya ada pada pencapaian kompetensi, bukan pada lamanya waktu. Peserta yang

berbeda mungkin membutuhkan waktu yang berbeda pula untuk menjadi kompeten dalam melakukan tugas tertentu.

2.2.4 Kesempatan untuk menjadi kompeten

Jika peserta latih belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, Instruktur akan mengatur rencana pelatihan dengan peserta latih yang bersangkutan. Rencana ini akan memberikan kesempatan kembali kepada peserta untuk meningkatkan level kompetensi sesuai dengan level yang diperlukan.

Jumlah maksimum usaha/kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali.

2.3 Unit Kompetensi yang Dipelajari

Dalam sistem pelatihan, Standar Kompetensi diharapkan menjadi panduan bagi peserta pelatihan atau siswa untuk dapat :

- mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan peserta pelatihan.
- mengidentifikasi apa yang telah dikerjakan peserta pelatihan.
- memeriksa kemajuan peserta pelatihan.
- menyakinkan bahwa semua elemen (sub-kompetensi) dan kriteria unjuk kerja telah dimasukkan dalam pelatihan dan penilaian.

2.3.1 Judul Unit

Malakukan analisis parsial perencanaan wilayah dan kota

2.3.2 Kode Unit

F45.PW.02.018.01

2.3.3 Deskripsi Unit

Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan analisis parsial perencanaan wilayah dan kota

2.3.4 Kemampuan Awal

Peserta pelatihan harus telah memiliki pengetahuan awal SOP perusahaan, komunikasi dan struktur organisasi perusahaan.

2.3.5 Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kondisi fisik wilayah kabupaten/kota	1.1 Data kondisi fisik wilayah perencanaan dianalisis. 1.2 Potensi fisik pengembangan wilayah dianalisis. 1.3 Masalah fisik pengembangan wilayah dianalisis.
2. Menganalisis kondisi sumber daya buatan di wilayah perencanaan	2.1 Data kondisi sumber daya buatan di wilayah perencanaan dianalisis. 2.2 Kondisi jaringan sarana dan prasarana dianalisis. 2.3 Potensi pengembangan sumberdaya buatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dianalisis. 2.4 Masalah pengembangan sumberdaya buatan dianalisis.
3. Menganalisis kondisi pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan jasa wilayah perencanaan	3.1 Data sektor wilayah perencanaan dianalisis. 3.2 Kecenderungan pertumbuhan sektoral dianalisis. 3.3 Potensi dan masalah kondisi sektoral wilayah perencanaan dianalisis.
4. Menganalisis kondisi sosial dan budaya wilayah perencanaan	4.1 Data kondisi sosial dan budaya wilayah perencanaan dianalisis. 4.2 Kecenderungan perkembangan penduduk dianalisis. 4.3 Potensi dan masalah social dan budaya wilayah perencanaan dianalisis.
5. Menyimpulkan hasil analisis dan merumuskan isu strategis wilayah	5.1 Hasil analisis disimpulkan. 5.2 Potensi wiayah dirumuskan. 5.3 Isu strategis wilayah dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan potensi wilayah perencanaan.
6. Menguraikan kebutuhan pengembangan	6.1 Laju perkembangan wilayah dirumuskan. 6.2 Proyeksi kebutuhan pengembangan dihitung. 6.3 Skenario pengembangan wilayah dirumuskan.

2.3.6 Batasan Variabel

1. Kontek Variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan analisis data untuk mendukung pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- 1.2 Secara garis besar ada dua rangkaian analisis utama yang harus dilakukan dalam perencanaan wilayah. Pertama, analisis untuk menggambarkan karakteristik wilayah. Kedua analisis potensi dan masalah pengembangan wilayah.
- 1.3 Karakteristik wilayah yang harus digambarkan, meliputi:
 - 1.3.1 Kedudukan dan peran dalam wilayah yang lebih luas (regional)
 - 1.3.2 Keterpaduan wilayah perencanaan dengan wilayah sekitarnya
 - 1.3.3 Karakteristik fisik wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:

- 1.3.3.1 Karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dan sebagainya), meliputi: potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami dan bencana alam geologi); potensi sumberdaya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi dan air tanah); dan kesesuaian lahan pertanian (tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan sebagainya).
 - 1.3.3.2 Karakteristik sosial-kependudukan, sekurang-kurangnya meliputi: sebaran kepadatan penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun); proporsi penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun); dan kualitas SDM dalam mendapatkan kesempatan kerja.
 - 1.3.3.3 Karakteristik ekonomi wilayah, sekurang-kurangnya meliputi: basis ekonomi wilayah, ekonomi lokal, dan sektor informal; prospek pertumbuhan ekonomi wilayah di masa yang akan datang; dan prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi.
 - 1.3.3.4 Kemampuan keuangan pembangunan daerah, sekurang-kurangnya meliputi: sumber penerimaan daerah dan alokasi pembiayaan pembangunan; dan prediksi peningkatan kemampuan keuangan pembangunan daerah.
- 1.4 Berdasarkan karakteristik tata ruang wilayah kota kemudian dilakukan analisis potensi dan masalah pengembangan kota yang meliputi:
- 1.4.1 Analisis daya dukung wilayah serta optimasi pemanfaatan ruang
 - 1.4.2 Analisis daya tampung wilayah
 - 1.4.3 Analisis pusat-pusat pelayanan
 - 1.4.4 Analisis kebutuhan ruang
 - 1.4.5 Analisis pembiayaan pembangunan
- 1.5 Hasil dari keseluruhan kegiatan analisis meliputi:
- 1.5.1 Visi pengembangan wilayah
 - 1.5.2 Potensi dan masalah penataan ruang wilayah kabupaten/kota dari multi aspek yang berpengaruh
 - 1.5.3 Peluang dan tantangan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dari multi aspek yang berpengaruh
 - 1.5.4 Kecenderungan perkembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan kabupaten/kota
 - 1.5.5 Perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah kabupaten/kota yang meliputi pengembangan struktur ruang seperti sistem perkotaan dan sistem prasarana, serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang

yang ada, serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan

1.5.6 Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah

2. **Perlengkapan yang diperlukan**

Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini, perlu disediakan peralatan dan sarana, antara lain:

2.1 Media penyimpanan data (komputer)

2.2 Media pencetakan (*printer*)

2.3 Media akses data (internet)

3. **Tugas yang harus dilakukan**

3.1 Menguraikan kedudukan wilayah perencanaan dalam wilayah yang lebih luas

3.2 Menguraikan kondisi fisik wilayah perencanaan

3.3 Menguraikan kondisi sumber daya buatan di wilayah perencanaan

3.4 Menguraikan kondisi ekonomi wilayah perencanaan

3.5 Menguraikan kondisi sosial dan budaya wilayah perencanaan

3.6 Menyimpulkan hasil analisis dan merumuskan isu strategis kawasan

3.7 Menguraikan kebutuhan pengembangan

4. **Peraturan – peraturan yang diperlukan**

4.1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,

4.2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

4.3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

4.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

4.5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

4.6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

4.7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

4.9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

4.10 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

- 4.11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- 4.12 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
- 4.13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- 4.14 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- 4.15 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budidaya
- 4.16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencana Rincinya
- 4.17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
- 4.18 Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007
- 4.19 Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang
- 4.20 Metode-metode terkait perencanaan wilayah:
 - 4.20.1 Metode kependudukan proyeksi penduduk
 - 4.20.2 Metode penghitungan daya dukung dan daya tampung wilayah
 - 4.20.3 Metode penghitungan ekonomi wilayah
 - 4.20.4 Metode analisis kesesuaian lahan
 - 4.20.5 Metode analisis lokasi
 - 4.20.6 Metode penghitungan kebutuhan fasilitas dan utilitas

2.3.7 Panduan Penilaian

1. Penjelasan prosedur penilaian

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan yang diperlukan sebelum menguasai unit serta unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Penguasaan unit kompetensi sebelumnya:

- 1.1.1 F45.PW01.001.01: Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

- | | | |
|-----------------------------|------------------|--|
| 1.1.2 | F45.PW01.002.01: | Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik |
| 1.1.3 | F45.PW02.001.01: | Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota |
| 1.1.4 | F45.PW02.002.01: | Menyiapkan Kebutuhan Data Perencanaan |
| 1.1.5 | F45.PW02.007.01: | Melakukan survei primer dan sekunder |
| 1.1.6 | F45.PW02.010.01: | Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial |
| 1.1.7 | F45.PW02.011.01: | Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial |
| 1.1.8 | F45.PW02.012.01: | Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial |
| 1.2 Kaitan dengan unit lain | | |
| 1.2.1 | F45.PW02.021.01: | Menyusun Rencana Parsial Sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota |
| 1.2.2 | F45.PW02.030.01: | Menyusun Laporan Pekerjaan Perencanaan |
| 1.2.3 | F45.PW03.001.01: | Menggunakan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan |
| 1.2.4 | F45.PW03.002.01: | Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi |

2. Kondisi Pengujian

Unit Kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar empat kerja secarasimulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar

Metode uji antara lain:

1. Ujian tertulis
2. Ujian lisan

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

- 3.1 Pengetahuan untuk menerapkan metode dan teknik-teknik analisis
- 3.2 Pengetahuan menghitung daya dukung dan daya tampung wilayah
- 3.3 kemampuan memproyeksi kondisi wilayah perencanaan hingga akhir tahun rencana

3.4 Pengetahuan untuk menghitung kebutuhan pengembangan wilayah perencanaan

4. Keterampilan yang dibutuhkan

4.1 Kemampuan memilih program/software sesuai kebutuhan

4.2 Kemampuan menggunakan program/software sesuai kebutuhan

5. Aspek Kritis

5.1 Kemampuan untuk memilih metode sesuai dengan kebutuhan

5.2 Kemampuan untuk memilih teknik-teknik analisis

6. Kompetensi kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

BAB III

STRATEGI DAN METODE PELATIHAN

3.1 Strategi Pelatihan

Belajar dalam suatu sistem pelatihan berbasis kompetensi berbeda dengan pelatihan klasikal yang diajarkan di kelas oleh instruktur. Pada sistem ini peserta pelatihan akan bertanggung jawab terhadap proses belajar secara sendiri, artinya bahwa peserta pelatihan perlu merencanakan kegiatan/proses belajar dengan Instruktur dan kemudian melaksanakannya dengan tekun sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

3.1.1 Persiapan / perencanaan

- 1) Membaca bahan/materi yang telah diidentifikasi dalam setiap tahap belajar dengan tujuan mendapatkan tinjauan umum mengenai isi proses belajar yang harus diikuti.
- 2) Membuat catatan terhadap apa yang telah dibaca.
- 3) Memikirkan bagaimana pengetahuan baru yang diperoleh berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki.
- 4) Merencanakan aplikasi praktek pengetahuan dan keterampilan.

3.1.2 Permulaan dari proses pembelajaran

- 1) Mencoba mengerjakan seluruh pertanyaan dan tugas praktek yang terdapat pada tahap belajar.
- 2) Mereview dan meninjau materi belajar agar dapat menggabungkan pengetahuan yang telah dimiliki.

3.1.3 Pengamatan terhadap tugas praktek

- 1) Mengamati keterampilan praktek yang didemonstrasikan oleh instruktur atau orang yang telah berpengalaman lainnya.
- 2) Mengajukan pertanyaan kepada instruktur tentang kesulitan yang ditemukan selama pengamatan.

3.1.4 Implementasi

- 1) Menerapkan pelatihan kerja yang aman.
- 2) Mengamati indikator kemajuan yang telah dicapai melalui kegiatan praktek.
- 3) Mempraktekkan keterampilan baru yang telah diperoleh.

3.1.5 Penilaian

Melaksanakan tugas penilaian untuk penyelesaian belajar peserta pelatihan

3.2 Metode Pelatihan

Terdapat tiga prinsip metode belajar yang dapat digunakan. Dalam beberapa kasus, kombinasi metode belajar mungkin dapat digunakan.

3.2.1 Belajar secara mandiri

Belajar secara mandiri membolehkan peserta pelatihan untuk belajar secara individual, sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Meskipun proses belajar dilaksanakan secara bebas, peserta pelatihan disarankan untuk menemui instruktur setiap saat untuk mengkonfirmasi kemajuan dan mengatasi kesulitan belajar.

3.2.2 Belajar berkelompok

Belajar berkelompok memungkinkan peserta pelatihan untuk datang bersama secara teratur dan berpartisipasi dalam sesi belajar berkelompok. Walaupun proses belajar memiliki prinsip sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, sesi kelompok memberikan interaksi antar peserta, instruktur dan pakar/ahli dari tempat kerja.

3.2.3 Belajar terstruktur

Belajar terstruktur meliputi sesi pertemuan kelas secara formal yang dilaksanakan oleh instruktur atau ahli lainnya. Sesi belajar ini umumnya mencakup topik tertentu.

3.3 Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan

Rancangan pembelajaran materi pelatihan bertujuan untuk melengkapi hasil analisis kebutuhan materi pelatihan. Rancangan pembelajaran materi pelatihan memberikan informasi yang bersifat indikatif yang selanjutnya dapat dijadikan oleh instruktur sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembelajaran (*session plan*) yang lebih operasional dan yang lebih bersifat strategis untuk membantu para peserta pelatihan mencapai unit kompetensi yang merupakan tugasnya sebagai instruktur.

Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan sebagai berikut:

Unit Kompetensi		Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota				
Elemen Kompetensi 1		Menganalisis kondisi fisik wilayah kabupaten/kota				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
1.1	Data kondisi fisik wilayah perencanaan dianalisis 1) Dapat menyebutkan data yang menggambarkan kondisi fisik	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menganalisis data kondisi fisik wilayah	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menyebutkan data yang menggambarkan kondisi fisik wilayah perencanaan 2) Memilih instrumen analisis kondisi fisik wilayah yang	1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 3) Undang-undang	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>wilayah perencanaan</p> <p>2) Mampu memilih instrumen analisis kondisi fisik wilayah yang tepat dan sesuai dengan format data yang tersedia</p> <p>3) Harus mampu melaksanakan analisis fisik wilayah dengan cermat dan komprehensif</p>			<p>tepat dan sesuai dengan format data yang tersedia</p> <p>3) Melaksanakan analisis fisik wilayah dengan cermat dan komprehensif</p>	<p>Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air</p> <p>5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan</p> <p>6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</p> <p>7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman</p> <p>9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</p> <p>12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					<p>Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</p> <p>13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang</p> <p>14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung</p> <p>15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budidaya</p> <p>16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencana Rincinya</p> <p>17) Peraturan Menteri Pekerjaan</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 18) Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007 19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang 20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah	
1.2	Potensi fisik pengembangan wilayah dianalisis. 1) Dapat menggambarkan potensi fisik pengembangan wilayah 2) Mampu memilih instrumen analisis potensi wilayah yang tepat dan sesuai dengan format data yang tersedia 3) Mampu memetakan kategori potensi rawan bencana alam di wilayah perencanaan	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menganalisis potensi fisik pengembangan wilayah	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Memilih potensi apa saja yang perlu dianalisis terkait dengan perencanaan wilayah 2) Memilih instrumen analisis potensi wilayah yang tepat dan sesuai dengan format data yang tersedia 3) Memetakan kategori potensi rawan bencana alam di wilayah perencanaan 4) Memetakann secara spatial	1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>an</p> <p>4) Mampu memetakan kategori potensi sumberdaya alam di wilayah perencanaan</p> <p>5) Mampu memetakan kategori potensi kesesuaian lahan</p>			<p>kategori potensi sumberdaya alam di wilayah perencanaan</p> <p>5) Memetakan kategori potensi kesesuaian lahan</p>	<p>Konstruksi</p> <p>7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman</p> <p>9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</p> <p>12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</p> <p>13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budidaya 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencananya 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 18) Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang 20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah	
1.3	<p>Masalah fisik pengembangan wilayah dianalisis.</p> <p>1) Mampu memilih masalah fisik apa saja yang perlu dianalisis terkait dengan perencanaan wilayah</p> <p>2) Dapat menjelaskan metode analisis masalah fisik wilayah perencanaan</p> <p>3) Mampu memilih instrumen analisis masalah fisik wilayah yang tepat dan sesuai dengan format data yang tersedia</p> <p>4) Harus mampu memetakan masalah fisik di wilayah perencanaan</p> <p>5) Dapat menganalisis masalah fisik di wilayah dengan cermat</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menganalisis masalah fisik pengembangan wilayah</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Demonstrasi</p> <p>3. Tugas</p>	<p>1) Memilih masalah fisik apa saja yang perlu dianalisis terkait dengan perencanaan wilayah</p> <p>2) Menjelaskan metode analisis masalah fisik wilayah perencanaan</p> <p>3) Memilih instrumen analisis masalah fisik wilayah yang tepat dan sesuai dengan format data yang tersedia</p> <p>4) Memetakan masalah fisik di wilayah perencanaan</p> <p>5) Menganalisis masalah fisik di wilayah dengan cermat</p>	<p>1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,</p> <p>2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan</p> <p>3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air</p> <p>5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan</p> <p>6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</p> <p>7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman</p> <p>9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan</p>	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Ekosistemnya 10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang 14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budaya 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencana Rincinya 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 18) Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007 19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang 20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah	

Unit Kompetensi		Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota				
Elemen Kompetensi 2		Menganalisis kondisi sumber daya buatan di wilayah perencanaan				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
2.1	<p>Data kondisi sumber daya buatan di wilayah perencanaan dianalisis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapat memilih sumber daya buatan apa saja yang perlu dianalisis terkait dengan perencanaan wilayah 2) Dapat menjelaskan metode analisis sumber daya buatan di wilayah perencanaan 3) Mampu memilih instrumen analisis sumber daya buatan di wilayah yang tepat dan sesuai dengan format data yang tersedia 4) Mampu memetakan sumber daya buatan di wilayah perencanaan 5) Harus mampu menganalisis sumber daya buatan di wilayah dengan 	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menganalisis data kondisi sumber daya buatan wilayah perencanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memilih sumber daya buatan apa saja yang perlu dianalisis terkait dengan perencanaan wilayah 2) Menjelaskan metode analisis sumber daya buatan di wilayah perencanaan 3) Memilih instrumen analisis sumber daya buatan di wilayah yang tepat dan sesuai dengan format data yang tersedia 4) Memetakan sumber daya buatan di wilayah perencanaan 5) Menganalisis sumber daya buatan di wilayah dengan cermat dan menyeluruh 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman 9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 10) Peraturan 	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	cermat dan menyeluruh				Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang 14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budidaya 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencana Rincinya 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 18) Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007 19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang 20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah	
2.2	Kondisi jaringan sarana dan prasarana	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menganalisis kondisi	1. Ceramah 2. Demonst	1) Menjelaskan kondisi jaringan sarana dan	1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>dianalisis.</p> <p>1) Dapat menjelaskan kondisi jaringan sarana dan prasarana terkait dengan perencanaan wilayah</p> <p>2) Dapat menjelaskan metode analisis jaringan sarana dan prasarana di wilayah perencanaan</p> <p>3) Mampu memilih instrumen analisis jaringan sarana dan prasarana di wilayah yang tepat dan sesuai dengan format data yang tersedia</p> <p>4) Mampu memetakan jaringan sarana dan prasarana di wilayah perencanaan</p> <p>5) Harus mampu menganalisis jaringan sarana dan prasarana wilayah dengan cermat dan komprehensif</p>	<p>si jaringan saraba dan prasarana</p>	<p>3. Tugas</p>	<p>prasarana terkait dengan perencanaan wilayah</p> <p>2) Menjelaskan metode analisis jaringan sarana dan prasarana di wilayah perencanaan</p> <p>3) Memilih instrumen analisis jaringan sarana dan prasarana di wilayah yang tepat dan sesuai dengan format data yang tersedia</p> <p>4) Memetakan jaringan sarana dan prasarana di wilayah perencanaan</p> <p>5) Melaksanakan analisis jaringan sarana dan prasarana wilayah dengan cermat dan komprehensif</p>	<p>Penataan Ruang,</p> <p>2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan</p> <p>3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air</p> <p>5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan</p> <p>6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</p> <p>7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman</p> <p>9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>11) Peraturan</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang 14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budidaya 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencana Rincinya 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 18) Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007 19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang 20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah	
2. 3	Potensi pengembangan sumberdaya buatan dianalisis. 1) Dapat menjelaskan potensi pengembangan sumberdaya	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menganalisis potensi pengembangan wilayah	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menjelaskan potensi pengembangan sumberdaya buatan terkait dengan perencanaan wilayah 2) Menjelaskan metode	1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 3) Undang-undang Nomor	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>a buatan terkait dengan perencanaan wilayah</p> <p>2) Dapat menjelaskan metode analisis potensi pengembangan sumberdaya buatan di wilayah perencanaan</p> <p>3) Mampu memilih instrumen analisis potensi pengembangan sumberdaya buatan di wilayah yang tepat dan sesuai dengan format data yang tersedia</p> <p>4) Mampu memetakan potensi pengembangan sumberdaya buatan di wilayah perencanaan</p> <p>5) Harus mampu melaksanakan analisis potensi pengembangan sumberdaya buatan dengan cermat</p>			<p>analisis potensi pengembangan sumberdaya buatan di wilayah perencanaan</p> <p>3) Memilih instrumen analisis potensi pengembangan sumberdaya buatan di wilayah yang tepat dan sesuai dengan format data yang tersedia</p> <p>4) Memetakan potensi pengembangan sumberdaya buatan di wilayah perencanaan</p> <p>5) Melaksanakan analisis potensi pengembangan sumberdaya buatan</p>	<p>32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air</p> <p>5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan</p> <p>6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</p> <p>7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman</p> <p>9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</p> <p>12) Peraturan</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang 14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budidaya 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Kabupaten / Kota Beserta Rencana Rincinya 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 18) Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007 19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang 20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah	
2.4	Masalah pengembangan sumberdaya buatan dianalisis 1) Dapat menjelaskan masalah pengembangan sumberdaya buatan apa saja yang perlu dianalisis terkait dengan perencanaan wilayah	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta mampu menganalisis masalah pengembangan sumberdaya buatan	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menjelaskan masalah pengembangan sumberdaya buatan apa saja yang perlu dianalisis terkait dengan perencanaan wilayah 2) Memilih metode analisis masalah pengembangan sumberdaya	1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>2) Mampu memilih metode analisis masalah pengembangan sumberdaya buatan wilayah perencanaan</p> <p>3) Mampu memetakan masalah pengembangan sumberdaya buatan di wilayah perencanaan</p> <p>4) Harus mampu menganalisis masalah pengembangan sumberdaya buatan di wilayah dengan cermat dan menyeluruh</p>			<p>buatan wilayah perencanaan</p> <p>3) Memetakan masalah pengembangan sumberdaya buatan di wilayah perencanaan</p> <p>4) Menganalisis masalah pengembangan sumberdaya buatan di wilayah dengan cermat dan menyeluruh</p>	<p>Sumber Daya Air</p> <p>5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan</p> <p>6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</p> <p>7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman</p> <p>9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</p> <p>12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					13) Ruang Wilayah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang 14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budidaya 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencana Rincinya 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 18) Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007 19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang 20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah	

Unit Kompetensi		Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota				
Elemen Kompetensi 3		Menganalisis kondisi pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan jasa wilayah perencanaan				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
3.1	Data sektor wilayah perencanaan dianalisis. 1) Dapat menjelaskan kondisi masing-masing sektor di wilayah perencanaan 2) Mampu memetakan kondisi masing-masing	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menganalisis data sektor wilayah perencanaan	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menjelaskan kondisi masing-masing sektor di wilayah perencanaan 2) Memetakan kondisi masing-masing sektor tersebut secara spasial 3) Memilih metode	1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 4) Undang-	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>sektor tersebut secara spasial</p> <p>3) Dapat memilih metode analisis yang tepat untuk menjelaskan kondisi masing-masing sektor di wilayah perencanaan</p> <p>4) Harus mampu menganalisis dengan cermat kondisi masing-masing sektor di wilayah perencanaan</p>			<p>analisis yang tepat untuk menjelaskan kondisi masing-masing sektor di wilayah perencanaan</p> <p>4) Menganalisis dengan cermat kondisi tiap sektor di wilayah perencanaan</p>	<p>Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air</p> <p>5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan</p> <p>6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</p> <p>7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman</p> <p>9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</p> <p>12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</p> <p>13) Peraturan</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang 14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budidaya 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencana Rincinya 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Ruang Wilayah Kabupaten 18) Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007 19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang 20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah	
3.2	Kecenderungan pertumbuhan sektoral dianalisis. 1) Dapat memilih metode analisis yang menggambarkan kecenderungan pertumbuhan sektoral di wilayah perencanaan 2) Harus mampu menjelaskan dengan tepat kecenderungan pertumbuhan sektoral di wilayah perencanaan 3) Mampu mengaitkan kecenderungan pertumbuhan sektoral dengan kondisi fisik wilayah 4) Mampu memetakan	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Memilih analisis untuk menjelaskan kecenderungan pertumbuhan sektoral di wilayah perencanaan 2) Menjelaskan dengan tepat kecenderungan pertumbuhan sektoral di wilayah perencanaan 3) Mengaitkan kecenderungan pertumbuhan sektoral dengan kondisi fisik wilayah 4) Memetakan secara spatial kecenderungan pertumbuhan sektoral di wilayah perencanaan 5) Memetakan secara	1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>secara spasial kecenderungan pertumbuhan sektoral di wilayah perencanaan</p> <p>5) Mampu memetakan secara spasial kecenderungan pertumbuhan sektoral di wilayah perencanaan</p>			<p>spasial kecenderungan pertumbuhan sektoral di wilayah perencanaan</p>	<p>Lingkungan Hidup</p> <p>8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman</p> <p>9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</p> <p>12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</p> <p>13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang</p> <p>14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Kawasan Lindung 15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budidaya 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencana Rincinya 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 18) Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007 19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah	
3.3	<p>Potensi dan masalah kondisi sektoral wilayah perencanaan dianalisis.</p> <p>1) Dapat memilih metode analisis yang tepat untuk menjelaskan potensi dan masalah kondisi masing-masing sektor</p> <p>2) Mampu menguraikan potensi dan masalah kondisi sektoral wilayah perencanaan secara menyeluruh</p> <p>3) Harus mampu dalam melaksanakan analisis potensi dan masalah kondisi tiap sektor di wilayah perencanaan secara cermat</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Demonstrasi</p> <p>3. Tugas</p>	<p>1) Memilih metode analisis yang tepat untuk menjelaskan potensi dan masalah kondisi tiap sektor</p> <p>2) Menguraikan potensi dan masalah kondisi sektoral wilayah perencanaan secara menyeluruh</p> <p>3) Melaksanakan analisis potensi dan masalah kondisi tiap sektor di wilayah perencanaan</p>	<p>1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,</p> <p>2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan</p> <p>3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air</p> <p>5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan</p> <p>6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</p> <p>7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman</p> <p>9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang</p>	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Penyelenggaraan Penataan Ruang 11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang 14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budidaya 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rincinya 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 18) Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007 19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang 20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah	

Unit Kompetensi		Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota				
Elemen Kompetensi 4		Menganalisis kondisi sosial dan budaya wilayah perencanaan				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
41	Data kondisi sosial dan budaya wilayah perencanaan dianalisis.	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi sosial	1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>1) Dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi sosial dan budaya di wilayah perencanaan</p> <p>2) Dapat menjelaskan kondisi sosial dan budaya daerah perencanaan</p> <p>3) Harus mampu melakukan analisis kondisi sosial dan budaya wilayah perencanaan dengan cermat</p>			<p>dan budaya di wilayah perencanaan</p> <p>2) Menjelaskan kondisi sosial dan budaya daerah perencanaan</p> <p>3) Melakukan analisis dengan cermat</p>	<p>Ruang,</p> <p>2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan</p> <p>3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air</p> <p>5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan</p> <p>6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</p> <p>7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman</p> <p>9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Ruang Wilayah Nasional 12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang 14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budaya 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten /	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Kota Beserta Rencana Rincinya 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 18) Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007 19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang 20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah	
4.2	Kecenderungan perkembangan penduduk dianalisis. 1) Dapat menjelaskan kondisi sebaran dan kepadatan penduduk saat ini dan di masa yang akan datang (20 tahun) 2) Mampu memilih metode analisis yang tepat dalam memprediksi kecenderun	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menjelaskan kondisi sebaran dan kepadatan penduduk saat ini dan di masa yang akan datang (20 tahun) 2) Memilih metode analisis yang tepat dalam memprediksi kecenderungan perkembangan penduduk 3) Menganalisis kecenderungan perkembangan penduduk di wilayah perencanaan	1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>gan perkembangan penduduk</p> <p>3) Harus mampu menganalisis kecenderungan perkembangan penduduk di wilayah perencanaan dengan cermat</p>				<p>Tentang Kehutanan</p> <p>6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</p> <p>7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman</p> <p>9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</p> <p>12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</p> <p>13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					<p>dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang</p> <p>14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung</p> <p>15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budidaya</p> <p>16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencana Rincinya</p> <p>17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten</p> <p>18) Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					<p>dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007</p> <p>19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang</p> <p>20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah</p>	
4.3	<p>Potensi dan masalah social dan budaya wilayah perencanaan dianalisis.</p> <p>1) Dapat menunjukan potensi dan masalah sosial budaya di wilayah perencanaan dengan tepat</p> <p>2) Dapat menjelaskan kualitas SDM di masa mendatang</p> <p>3) Harus mampu memetakan potensi dan masalah sosial budaya di wilayah perencanaan secara cermat</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Demonstrasi</p> <p>3. Tugas</p>	<p>1) Menunjukkan potensi dan masalah sosial budaya di wilayah perencanaan dengan tepat</p> <p>2) Menjelaskan kualitas SDM di masa mendatang</p> <p>3) Memetakan potensi dan masalah sosial budaya di wilayah perencanaan secara cermat</p>	<p>1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,</p> <p>2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan</p> <p>3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air</p> <p>5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan</p> <p>6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</p> <p>7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman</p> <p>9) Undang-undang</p>	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					<p>Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem nya</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</p> <p>12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</p> <p>13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang</p> <p>14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung</p> <p>15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Budaya 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencananya 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 18) Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007 19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang 20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah	

Unit Kompetensi		Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota				
Elemen Kompetensi 5		Menyimpulkan hasil analisis dan merumuskan isu strategis wilayah				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikator
51	<p>Hasil analisis disimpulkan</p> <p>1) Dapat menentukan dengan tepat pokok-pokok hasil analisis dari isu strategis wilayah yang membentuk karakteristik wilayah</p> <p>2) Mampu menyimpulkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah perencanaan</p> <p>3) Mampu memetakan secara spasial kecenderungan perkembangan kabupaten/kota</p> <p>4) Harus mampu menyimpulkan hasil analisis isu strategis wilayah dengan cermat</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Demonstrasi</p> <p>3. Tugas</p>	<p>1) Menentukan dengan tepat pokok-pokok hasil analisis dari isu strategis wilayah yang membentuk karakteristik wilayah</p> <p>2) Menyimpulkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah perencanaan</p> <p>3) Memetakan secara spasial kecenderungan perkembangan kabupaten/kota</p> <p>4) Menyimpulkan hasil analisis isu strategis wilayah dengan cermat</p>	<p>1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,</p> <p>2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan</p> <p>3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air</p> <p>5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan</p> <p>6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</p> <p>7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman</p> <p>9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang</p>	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Penyelenggaraan Penataan Ruang 11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang 14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budidaya 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencananya</p> <p>17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten</p> <p>18) Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007</p> <p>19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang</p> <p>20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah</p>	
5.2	<p>Potensi wilayah dirumuskan</p> <p>1) Dapat menentukan potensi-potensi terkait penataan ruang wilayah kabupaten/kota dari multi aspek yang berpengaruh</p> <p>2) Mampu membuat</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Demonstrasi</p> <p>3. Tugas</p>	<p>1) Menentukan potensi-potensi terkait penataan ruang wilayah kabupaten/kota dari multi aspek yang berpengaruh</p> <p>2) Merumuskan potensi wilayah dengan masalah</p>	<p>1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,</p> <p>2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan</p> <p>3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah</p>	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>rumusan potensi wilayah dengan masalah terkait penataan ruang</p> <p>3) Harus mampu merumuskan potensi wilayah terkait penataan ruang secara cermat</p>			<p>terkait penataan ruang</p> <p>3) Merumuskan potensi wilayah dengan teliti</p>	<p>4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air</p> <p>5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan</p> <p>6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</p> <p>7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman</p> <p>9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem nya</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</p> <p>12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang 14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budidaya 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencana Rincinya 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 18) Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007 19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang 20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah	
5.3	Isu strategis wilayah dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan potensi wilayah perencanaan. 1) Dapat memilih isu strategis wilayah untuk dirumuskan sesuai dengan hasil analisis 2) Mampu menjelaskan isu strategis dan menggambar kan peluang dan tantangan terkait penataan ruang wilayah kabupaten/kota dari multi aspek yang berpengaruh 3) Harus mampu merumuskan isu strategis	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Memilih isu strategis wilayah untuk dirumuskan sesuai dengan hasil analisis 2) Menjelaskan isu strategis hasil memetakan peluang dan tantangan terkait penataan ruang wilayah kabupaten/kota dari multi aspek yang berpengaruh 3) Merumuskan isu strategis wilayah secara teliti	1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	wilayah berdasarkan permasalahan dan potensi wilayah perencanaan secara teliti				Pengelolaan Lingkungan Hidup 8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman 9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang 14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Pengelolaan Kawasan Lindung 15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budidaya 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencananya 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 18) Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007 19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Ruang 20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah	

Unit Kompetensi Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota

Elemen Kompetensi 6 Menguraikan kebutuhan pengembangan

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
6.1	Laju perkembangan wilayah dirumuskan 1) Dapat menjabarkan laju perkembangan wilayah berdasarkan hasil analisis berdasarkan multi aspek 2) Mampu memilih metode analisis laju perkembangan wilayah 3) Harus mampu merumuskan laju perkembangan wilayah dengan seksama	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menjabarkan laju perkembangan wilayah berdasarkan hasil analisis dari multi aspek 2) Memilih metode analisis laju perkembangan wilayah 3) Merumuskan laju perkembangan wilayah dengan seksama	1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					<p>9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem nya</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</p> <p>12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</p> <p>13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang</p> <p>14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung</p> <p>15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Kawasan Budidaya 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rincinya 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 18) Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007 19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang 20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
6.2	<p>Proyeksi kebutuhan pengembangan dihitung.</p> <p>1) Dapat menjelaskan kebutuhan pengembangan apa saja yang perlu dihitung</p> <p>2) Mampu memilih metode untuk menghitung proyeksi kebutuhan pengembangan struktur ruang (sistem perkotaan dan sistem prasarana) sesuai analisis faktor peluang dan tantangan wilayah yang sudah ditentukan</p> <p>3) Harus mampu melakukan proyeksi kebutuhan pengembangan secara cermat</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Demonstrasi</p> <p>3. Tugas</p>	<p>1) Menjelaskan kebutuhan pengembangan apa saja yang perlu dihitung</p> <p>2) Memilih metode untuk menghitung proyeksi kebutuhan pengembangan struktur ruang (sistem perkotaan dan sistem prasarana) sesuai analisis faktor peluang dan tantangan wilayah yang sudah ditentukan</p> <p>3) Melakukan proyeksi kebutuhan pengembangan dengan secara cermat</p>	<p>1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,</p> <p>2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan</p> <p>3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air</p> <p>5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan</p> <p>6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</p> <p>7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman</p> <p>9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>11) Peraturan</p>	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang 14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budaya 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencana Rincinya 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 18) Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007 19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang 20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah	
6.3	Skenario pengembangan wilayah dirumuskan. 1) Dapat merumuskan skenario pengembangan wilayah berdasarkan perhitungan proyeksi dan kebutuhan pengembangan 2) Mampu menjelaskan pokok-pokok skenario pengembangan	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Merumuskan skenario pengembangan wilayah berdasarkan perhitungan proyeksi dan kebutuhan pengembangan 2) Menjelaskan pokok-pokok skenario pengembangan wilayah	1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>an wilayah dengan tepat</p> <p>3) Harus mampu menguraikan skenario pengembangan wilayah berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan pengembangan secara cermat</p>			<p>dengan tepat</p> <p>3) menguraikan skenario pengembangan wilayah berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan pengembangan secara cermat</p>	<p>Sumber Daya Air</p> <p>5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan</p> <p>6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</p> <p>7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman</p> <p>9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</p> <p>12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</p> <p>13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					<p>Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang</p> <p>14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung</p> <p>15) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budaya</p> <p>16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencana Rincinya</p> <p>17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten</p> <p>18) Pedoman</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007 19) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang 20) Metode-metode terkait perencanaan wilayah	

BAB IV

ANALISIS PARSIAL PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

4.1. Umum

Modul ini meliputi analisis kondisi fisik wilayah, analisis sumber daya buatan, analisis sektoral, analisis sosial budaya, penyusunan hasil rencana dan penyusunan album peta.

4.2. Analisis Kondisi Fisik Wilayah

4.2.1. Analisis data kondisi fisik wilayah perencanaan

a. Penggambaran kondisi fisik wilayah perencanaan

Kondisi fisik wilayah perencanaan digambarkan, diantaranya adalah dengan menyebutkan kondisi fisik wilayah perencanaan antara lain data topografi (ketinggian, kemiringan, kelerengan), data hidrologi, data geologi, data kawasan rawan bencana, klimatologi, penggunaan lahan, sumber daya mineral.

Misalnya kondisi topografi wilayah pada Kabupaten Karimun. Secara spasial, topografi daerah ini memiliki beberapa kesamaan, pada beberapa gugusan kepulauan. Kondisi wilayah tersebut dominan relatif datar dan landai. Ketinggian wilayah 0 hingga 500 meter dari permukaan laut (mdpl). Sedangkan wilayah yang berbukit dan bergunung terdapat pada bagian utara Pulau Karimun



Gambar 4.1. Topografi wilayah Kabupaten Karimun berdasarkan citra satelit Google Earth (Pemerintahan Kabupaten Karimun, 2012).

- b. Pemilihan instrumen analisis kondisi fisik wilayah yang tepat dan sesuai dengan format data yang tersedia

Instrumen analisis kondisi fisik wilayah dipilih yang tepat dan sesuai dengan format data yang tersedia dengan menjelaskan pilihan instrumen analisis secara rasional. Penilaian kesesuaian lahan dengan menggunakan Metode Indeks Terbobot yaitu hasil perkalian antara nilai skor kategori dengan nilai bobot faktor tiap faktor pendukung.

Misal dalam analisis kesesuaian wilayah terhadap pertanian padi menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG digunakan untuk melakukan pemodelan spasial berdasarkan metode overlay indeks terbobot. Pembobotan terhadap kriteria/ faktor yang menentukan seperti jenis tanah, curah hujan, kelerengan dan sebagainya. Variabel tersebut dinilai akan mempengaruhi pertumbuhan padi. Oleh karenanya, pembobotan variabel dilakukan berdasarkan kondisi fisik suatu wilayah maupun literatur/penelitian sebelumnya.

- c. Analisis fisik wilayah

Analisis fisik wilayah dijelaskan dengan tepat, diantaranya letak geografis dan morfologi wilayah perencanaan, dapat menjelaskan tentang iklim, tanah, geologi di suatu wilayah. Sebagai contoh analisa kesesuaian lahan untuk melihat topologi penggunaan lahan sesuai kriteria dan daya dukung lingkungan.

4.2.2. Analisis potensi fisik pengembangan wilayah

- a. Analisis potensi fisik pengembangan wilayah

Analisis potensi fisik pengembangan wilayah meliputi:

- Analisis bentuk medan (*landform*) dan dinamikanya dalam empat kriteria yaitu pegunungan, perbukitan, daratan dan cekungan, sebagai contoh kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan.
- Analisis potensi sumberdaya alam
- Analisis perubahan tutupan lahan (*land use changes*) dilakukan dengan menggunakan data citra penginderaan jauh multi temporal. Analisis ini difokuskan pada analisis perubahan hutan dan lahan, analisis wilayah pasir dan pesisir dan pulau-pulau kecil serta analisis daerah permukiman desa dan kota

- b. Analisis potensi resiko bencana alam di wilayah perencanaan

Analisis resiko bencana alam di wilayah perencanaan yaitu rawan bencana tsunami, gempa, longsor, banjir, dan lainnya. Data-data kebencanaan ini diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Indonesia terletak pada *ring of fire*, yaitu jalur gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik, sehingga memiliki potensi rawan bencana gempa dan tsunami apabila gempa berada di dasar laut dengan kedalaman kurang dari 30 km. Dalam perencanaan pembangunan permukiman, harus membuat bangunan tahan gempa ataupun jalur evakuasi di daerah rawan bencana tersebut.



Gambar 4. 2 Aktivitas Gunung Api Indonesia (Sumber: USGS)

- c. Pemilihan teknik analisis potensi wilayah yang tepat dan sesuai dengan data yang tersedia

Instrumen analisis potensi wilayah dipilih yang tepat dan sesuai dengan data yang tersedia ditetapkan. Misalnya untuk menganalisis potensi lahan pertanian basah di suatu wilayah, maka setidaknya menggunakan *super impose* peta kemiringan lereng, jenis tanah, dan iklim pada wilayah tersebut.

- d. Penjelasan hasil analisis potensi wilayah perencanaan

Deskripsi analisis potensi wilayah perencanaan harus memperhatikan norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang (NPSK) yang berlaku

Dalam menganalisis potensi wilayah bukan hanya memiliki efek merusak seperti potensi wilayah bencana tetapi juga yang memiliki efek potensi membangun yakni potensi pariwisata dari bentang alam, sungai dan DAS ataupun potensi banjir. Misal untuk menganalisis potensi wilayah mengacu pada Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik

dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/ PRT/M/2007 perlu diperhatikan secara mendetail.

Sebagai contoh, informasi kemiringan dan arah lereng sangat diperlukan bagi pengelolaan lahan. Parameter kelerengan juga digunakan untuk klasifikasi beberapa keperluan, misalnya untuk penentuan fungsi lindung dan budidaya. Jadi informasi ini sangat dibutuhkan untuk keperluan pengelolaan termasuk pengelolaan hutan. Keterkaitan kelerengan lahan dengan parameter lain cukup dominan. Biasanya pada topografi yang berbeda, yang berarti kemiringan lerengnya berbeda, maka perkembangan tanahnya juga berbeda. Perbedaan perkembangan tanah juga berarti ada perbedaan karakteristiknya. Perkembangan tanah juga dipengaruhi oleh arah lereng, karena perbedaan arah lereng akan mempengaruhi kecepatan pelapukan batuan menjadi tanah. Dengan demikian maka kemiringan lereng biasanya mengandung konsekuensi perbedaan tekstur tanah, kondisi drainase, jenis tanaman dan kedalaman tanah.

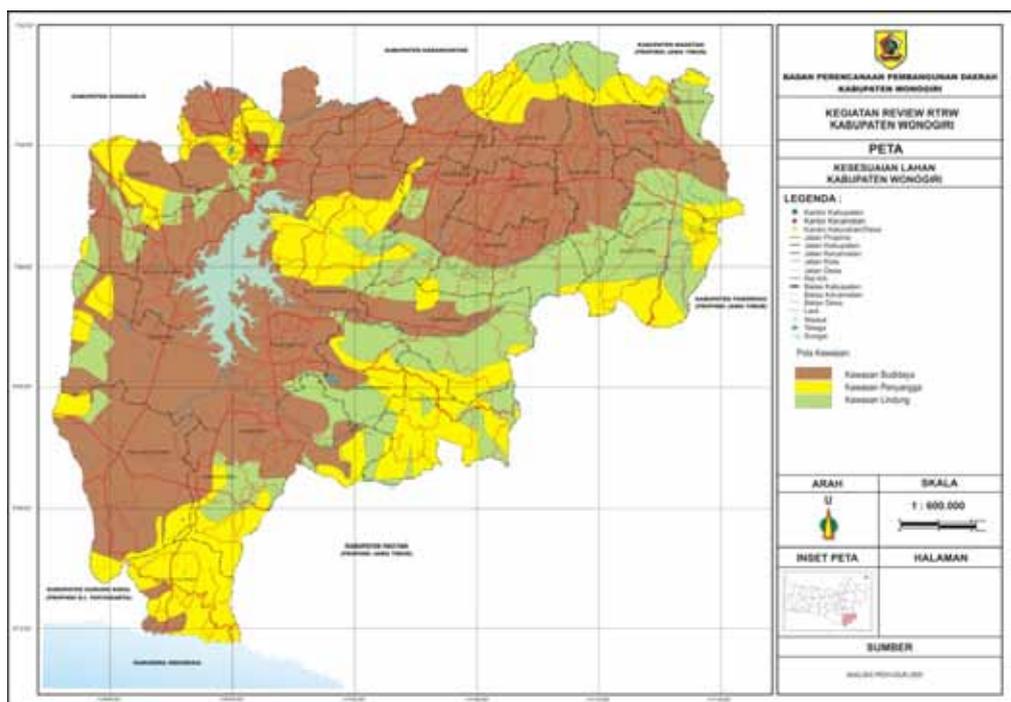
Tabel 4. 1 Karakteristik Kawasan Peruntukan Pertanian

Kriteria Teknis	Pertanian Lahan Basah	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Tanaman Tahunan
Iklim:			
Kelembaban (%)	33 - 90	29 - 32	42 - 75
Curah Hujan (mm)	A, B, C (Schmidt & Ferguson, 1951)	350 - 600	1200 - 1600
Sifat Fisik Tanah:			
Drainase	agak baik s/d agak terhambat	baik s/d agak terhambat	baik s/d agak terhambat
Tekstur:			
Bahan Kasar (%)	h, ah, s < 15	h, ah, s < 15	h, ah, s < 35
Kedalaman Tanah (cm)	> 30	> 30	> 60
Ketebalan Gambut (cm)	< 200	< 200	< 200
Kematangan Gambut	saprik, hemik	saprik, hemik	saprik, hemik
Retensi Hara:			
Kejenuhan Basa (%)	> 30	> 30	> 30
Kemasaman Tanah (pH)	5,5 - 8,2	5,6 - 7,6	5,2 - 7,5
Kapasitas Tukar Kation (Cmol)	> 12	> 12	> 12
Kandungan C-Organik (%)	> 0,8	> 0,8	> 0,8
Toksisitas:			
Kedalaman Bahan Sulfidik (cm)	> 50	> 50	> 50
Salinitas (dS/m)	< 4	< 4	< 4
Bahaya Erosi:			
Lereng (%)	< 8	< 15	< 40
Tingkat Bahaya Erosi	r	sd	sd
Bahaya Banjir:			
Genangan	F0,F11,F12, F21,F23	F0,F11,F12, F21,F23	F0,F11,F12, F21,F23
Penyiapan Lahan:			
Batuan di Permukaan (%)	< atau = 25	< atau = 25	< atau = 25
Singkapan Batuan (%)	< atau = 25	< atau = 25	< atau = 25

Sumber : Puslitbangtanah, Departemen Pertanian

Tabel 4.1. merupakan ketentuan pengelolaan kawasan untuk pertanian lahan basah, kering, dan tanaman tahunan. Dalam metode analisis, keterangan pada masing-masing jenis pertanian tersebut memiliki perbedaan sesuai dengan ketentuan yang ada ada dalam hal ini Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 terkait ketentuan kriteria teknis kawasan budidaya.

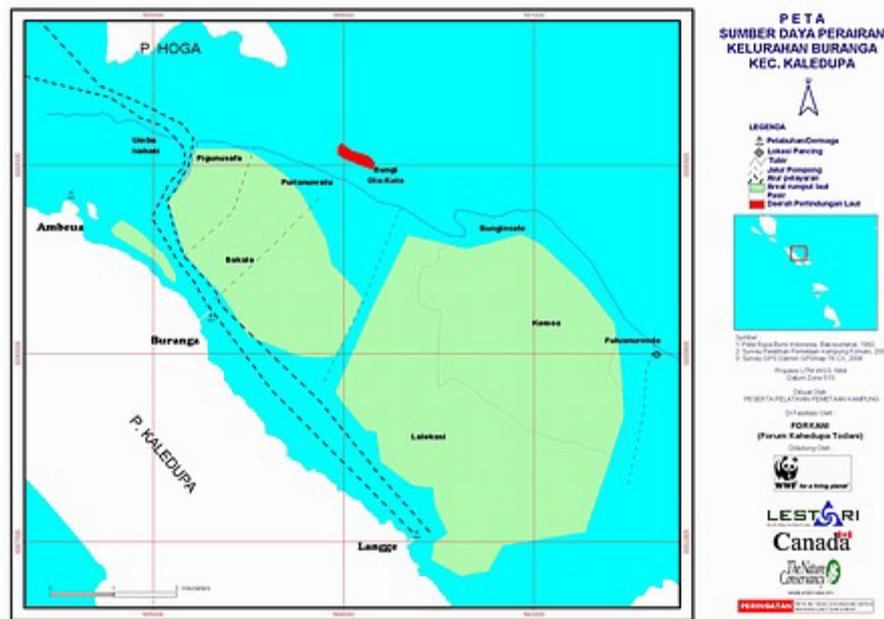
- e. Pemetaan potensi kesesuaian lahan di wilayah perencanaan
Pemetaan potensi kesesuaian lahan di wilayah perencanaan dengan keluaran peta kesesuaian lahan, dengan terlebih dahulu melakukan analisis potensi kesesuaian lahan.



Gambar 4. 4. Pemetaan Kesesuaian Lahan
(Sumber: RTRW Wonogiri 2009)

- f. Pemetaan potensi sumberdaya alam di wilayah perencanaan
Pemetaan potensi sumberdaya alam di wilayah perencanaan dengan keluaran peta potensi sumberdaya alam. Dalam perkembangannya, pemetaan potensi sumber daya alam pada wilayah daratan maupun laut ataupun pesisir. Badan Informasi Geospasial (BIG) memiliki bidang-bidang terkait pemetaan sumber daya alam darat dan laut. Contoh pemetaan sumber daya darat oleh BIG meliputi:
- Geomorfologi
 - Liputan Lahan
 - Lahan Basah
 - Kawasan Konservasi
 - Potensi Kawasan Lindung

- Ekosistem
- Lahan Kritis
- Resiko Bencana
- Neraca Sumber Daya Lahan
- Neraca Sumber Daya Air
- Neraca Sumber Daya Hutan
- Neraca Sumber Mineral
- Daerah Aliran Sungai
- Integrasi Neraca



Gambar 4. 3 Pemetaan Sumber Daya Laut (WWF, 2000)

4.2.3. Analisis masalah fisik pengembangan wilayah

- a. Pemilihan masalah fisik yang perlu dianalisis terkait dengan perencanaan wilayah

Pemilihan permasalahan fisik untuk dianalisis terkait dengan perencanaan wilayah diantaranya menyebutkan sumberdaya buatan apa saja yang perlu dianalisis terkait dengan perencanaan wilayah yaitu berbagai macam kawasan budidaya seperti hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, konservasi budaya dan sejarah.

Misal dalam melakukan analisis daya dukung lingkungan suatu wilayah perencanaan untuk peruntukan kawasan pertanian, maka masalah fisik mencakup karakteristik fisik dasar (ketinggian dan kelerengan), jenis tanah, guna lahan, tutupan lahan, ketersediaan lahan, kesesuaian lahan, dan sumber daya air.

- b. Pemilihan teknik analisis masalah fisik wilayah yang tepat dan sesuai dengan data yang tersedia
Teknik analisis masalah fisik wilayah yang tepat dan sesuai dengan data yang tersedia dipilih, sebagai contoh, teknik yang digunakan menggunakan *super impose* peta,
- c. Analisis masalah fisik di wilayah perencanaan
Analisis masalah fisik di wilayah perencanaan disusun berdasarkan kondisi saat ini (*existing condition*). Sebagai contoh, tutupan lahan yang berubah ke arah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dianalisis agar mencapai perencanaan yang berwawasan lingkungan dan sesuai daya dukungnya.
- d. Penjelasan analisis masalah fisik wilayah perencanaan
Analisis masalah fisik wilayah perencanaan dijelaskan dengan melihat karakteristik wilayah

Pada tahap penjelasan analisis masalah fisik, berbagai fenomena fisik keruangan yang berhasil diidentifikasi pada tahap sebelumnya dielaborasi menjadi satu narasi kondisi fisik yang komprehensif. Sebagai contoh, dari analisis hidrologi diketahui bahwa daerah A dialiri oleh DAS sungai dan dari analisis penggunaan lahan diketahui bahwa daerah A merupakan zona permukiman berkepadatan tinggi. Dari dua temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah A merupakan daerah yang perlu dibatasi pengembangannya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Untuk mengetahui kesesuaian lahan efektif untuk tempat tinggal misalnya menggunakan analisis fisik wilayah antara lain luas suatu wilayah, kemiringan lereng, luas sempadan (sungai atau pantai), dan tutupan lahan. Berikut merupakan salah satu tabel perhitungan untuk menghitung luas hunian efektif di suatu wilayah perencanaan.

Tabel 4. 3. Luas hunian efektif

No	Uraian	Rumus Perhitungan	Luas (Ha)	
			Wilayah A	Wilayah B
1	Luas Wilayah		150.7	210.5
2	Luas Sempadan Pantai (100m)-L1	Panjang garis pantai x panjang sempadan pantai	0.65	0.69
3	Luas Rawa-L2		1.3	16.5
4	Luas Pengembangan Wilayah Berdasarkan Klasifikasi Kemiringan Lereng-L3	Luas wilayah dengan kemiringan >15%	27.43	13.82
5	Luas (A)	Luas Wilayah - (L1-L2-L3)	148.75	193.31
6	Luas (B)	Luas A - (RTH 30% Luas A)	104.125	135.317
7	Luas Potensial (C)	Luas B - L3	76.69723	121.4984
8	Luas Efektif Hunian	50% dari luas (C)	38.34861	60.7492
9	Luas Jaringan dan Utilitas	20% dari Luas Efektif Hunian	7.669723	12.14984
10	Luas Efektif Sarana Prasarana	50% dari luas (C)	38.34861	60.7492

e. Pemetaan masalah fisik di wilayah perencanaan

Memetakan masalah fisik di wilayah perencanaan dengan membuat peta-peta fisik di wilayah perencanaan. Dalam memetakan masalah fisik di suatu wilayah, setidaknya mencakup peta-peta fisik dasar antara lain peta wilayah ketinggian, peta kelerangan, dan peta bentuk medan (morfologi). Namun, untuk menganalisis tematik yang lebih detail, dapat menggunakan data geologi, jenis tanah, curah hujan, suhu, dan sebagainya tergantung analisis untuk kebutuhan perencanaan seperti apa.

4.3. Analisis Sumber Daya Buatan

4.3.1. Analisis data kondisi sumber daya buatan di wilayah perencanaan

a. Pemilihan sumberdaya buatan apa saja yang perlu dianalisis terkait dengan perencanaan wilayah

Pemilihan sumberdaya buatan untuk dianalisis terkait dengan perencanaan wilayah seperti hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, konservasi budaya & sejarah. Sumberdaya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kepentingan pertahanan negara. Pemanfaatan sumber daya buatan akan mengurangi eksploitasi sumber daya alam sehingga tetap dapat menjaga keseimbangan ekosistem suatu wilayah

Bentuk sumber daya buatan ini dapat dilihat pada kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, maupun kawasan cagar alam. Fungsi kawasan-kawasan tersebut dapat sebagai pelindung kelestarian lingkungan hidup, dibudidayakan, permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan manusia dan kesinambungan pembangunan.

b. Penjelasan metode analisis sumberdaya buatan di wilayah perencanaan

Metode analisis sumberdaya buatan di wilayah perencanaan dijelaskan misalnya dalam menganalisis karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan. Dalam sebuah kasus misalnya, untuk menganalisis tentang karakteristik wilayah kesesuaian tanaman padi sawah dan sawah, dilakukan kajian dengan menggunakan variabel ketinggian, curah hujan, dan jenis tanah dengan asumsi bahwa ketiga variabel tersebut merupakan beberapa hal yang berpengaruh besar terhadap syarat tumbuh dan berkembangnya tanaman padi sawah dan kelapa.

Beberapa variabel yang berpengaruh diantaranya

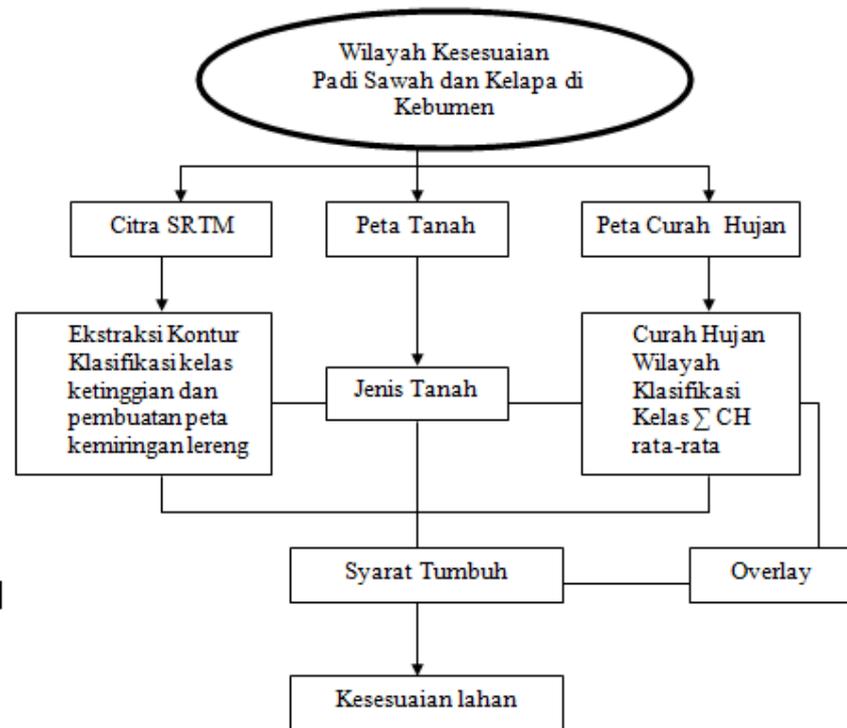
A. Untuk Tanaman Padi Sawah

1. Ketinggian (K) :
 1. 60 – 70 mdpl
 2. 70 – 80 mdpl
2. Jenis Tanah (JT):
 1. Organik
 2. Vulkanik
 3. Aluvium
 4. Sedimen
3. Tingkat Curah Hujan (CH) :
 1. 1750-2000 mm/ tahun

B. Untuk Tanaman Kelapa

1. Ketinggian (K) :
 1. 60 – 70 mdpl
 2. 70 – 80 mdpl
2. Jenis Tanah (JT):
 1. Organik
 2. Vulkanik
 3. Aluvium
 4. Sedimen
3. Tingkat Curah Hujan (CH) :
 1. 1750-2000 mm/tahun

Metode analisis wilayah kesesuaian lahan tersebut didasarkan atas kualitas dan karakteristik lahan (land characteristic) seperti curah hujan, ketinggian, dan jenis tanah dalam hubungannya dengan kebutuhan fisik tanaman khusus tanaman padi sawah dan kelapa. Analisis tersebut dengan menggunakan metode overlay.



Gambar 4. 5 Gambar Metode Analisis Kesesuaian Lahan Padi Sawah dan Kelapa

- c. Pemilihan instrumen analisis sumberdaya buatan di wilayah yang tepat dan sesuai dengan format data yang tersedia

Pemilihan instrumen analisis sumberdaya buatan di wilayah yang tepat dan sesuai dengan format data yang tersedia. Dalam menganalisis sumberdaya buatan, seringkali kita kesulitan dalam menganalisis data jika data-data yang diperlukan untuk analisis berasal dari sumber yang berbeda. Hal tersebut yang perlu dilakukan paling awal ialah menginventaris data-data yang ada seperti dibawah ini

Data yang digunakan :

1. Data SRTM untuk mendapatkan data ketinggian berupa kontur dan pembuatan peta lereng.
2. Data peta :
 - Peta Administrasi berupa informasi-informasi mengenai batas-batas administrasi kecamatan, jaringan sungai, dan jaringan jalan.
 - Peta jenis tanah berupa informasi-informasi mengenai persebaran jenis tanah.
 - Peta Iklim berupa informasi-informasi mengenai curah hujan tahunan.

Tabel 4. 4. Rangkuman Format Data Untuk Keperluan Analisis

No.	Data Sekunder	Bentuk		Sumber Perolehan
		Tabulasi	Spasial	
1	Peta Rupa Bumi Indonesia		v	Bakosurtanal
2	Peta Jenis Tanah		v	<u>Puslitank</u>
3	Data Curah Hujan		v	BMKG
4	Data SRTM		v	http://seamless.usgs.gov

d. Pemetaan sumberdaya buatan di wilayah perencanaan

Memetakan sumberdaya buatan di wilayah perencanaan, sebagai contoh dengan membuat peta pola ruang kawasan budidaya di wilayah perencanaan. Selain pola ruang pemetaan wilayah kesesuaian lahan untuk perencanaan juga termasuk kedalam pemetaan sumberdaya buatan.

Seperti dijelaskan pada poin sebelumnya, hasil dari analisis kesesuaian lahan tersebut yaitu peta kesesuaian lahan. Peta dasar fisik (tanah, ketinggian, dan curah hujan) sebagai sumber data yang dianalisis, menghasilkan Peta kesesuaian lahan. Berawal dari peta, menghasilkan peta kembali. Peta dalam hal ini merupakan alat bantu analisis terbaik untuk menunjukkan potensi wilayah.

e. Analisis sumberdaya buatan di wilayah perencanaan

Sumberdaya buatan di wilayah perencanaan dianalisis secara cermat dan menyeluruh. Poin paling penting, yaitu harus cermat dalam menganalisis sumberdaya buatan, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan, hingga analisis tersebut.

4.3.2. Analisis kondisi jaringan sarana dan prasarana

a. Penjelasan kondisi jaringan sarana dan prasarana terkait dengan perencanaan wilayah

Kondisi jaringan sarana dan prasarana terkait dengan perencanaan wilayah dijelaskan, meliputi jaringan jalan, air bersih, energi listrik, drainase, sampah, air limbah, kapasitas air baku dan rencana irigasi.

Dalam menjelaskan suatu kondisi jaringan air bersih misalnya, yang perlu diperhatikan yaitu pertama adalah sumber air, apakah berasal dari mata air, sumur, waduk, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan air bersih tersebut. Misalnya berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, kebutuhan air bersih per orang per hari untuk daerah perdesaan adalah 60 liter. Namun, hal ini perlu dikoreksi kembali dengan

survey lapang, apakah di setiap desa tersebut sama, lebih besar dari standar tersebut, atau sebaliknya lebih kecil kebutuhannya.

Analisis kondisi sarana dan prasarana air bersih ini juga memperhatikan kondisi jaringan, yaitu berkaitan dengan distribusi keterjangkauan air. Apakah disuatu wilayah semua sudah terlayani, apakah belum semua. Mengapa hal ini bisa terjadi. Apakah sering terjadi kebocoran dalam saluran air bersih (sebagai salah satu penyebab minimnya akses air). Apakah pernah terjadi kelangkaan air pada musim kering, dan sebagainya. Hal tersebut yang menjadi titik berat dalam analisis kondisi jaringan sarana dan prasarana air.

b. Penjelasan metode analisis jaringan sarana dan prasarana di wilayah perencanaan

Dalam menjelaskan metode analisis jaringan sarana dan prasarana di wilayah perencanaan, maka yang perlu diperhatikan adalah kondisi eksisting yang ada serta kebutuhan kedepan. Kondisi eksisting menggambarkan keadaan yang ada saat ini pada wilayah perencanaan, sedangkan kebutuhan kedepan dapat dilihat dari perhitungan proyeksi. Berikut merupakan contoh analisis jaringan sarana dan prasarana.

Kondisi Eksisting

Kondisi air bersih di wilayah studi yaitu di Kelurahan Kadilangu – Kelurahan Betokan yaitu masyarakatnya menggunakan sumber dari PDAM. Terdapat PDAM yaitu di Kelurahan Kadilangu, yang mensuplai air bersih ke sebagian besar penduduk di Kabupaten Demak. PDAM mengambil air dari sungai Kalijajar kemudian diolah dengan menggunakan teknologi penyaringan dan pengendapan menggunakan batuan. Ada juga sebagian warga yang masih mengandalkan air dari sungai Kalijajar untuk mandi dan mencuci, juga dimasak untuk minum. Untuk air bersih untuk memasak dan untuk minum, sebagian warga lebih memilih untuk membeli air galon isi ulang.

Analisis

Untuk menyesuaikan dengan konsep kami yaitu, konsumsi air bersih untuk seluruh warga disekitar bantaran sungai Kalijajar agar menggunakan air PDAM. Hal ini dikarenakan dengan konsep kami yaitu Transportasi Air untuk mendukung Agrowisata di Kelurahan Betokan juga menghubungkan transportasi melalui air dari Mekan Sunan Kalijaga di Kadilangu menuju Agrowisata di Kelurahan Betokan. Jadi warga tidak lagi menggunakan sungai Kalijajar sebagai sumber air untuk mandi, mencuci bahkan MCK karena hal ini akan mengganggu jalur transportasi air nantinya. Pembuatan pipa saluran dari PDAM menuju shelter – shelter di sepanjang aliran sungai Kalijajar sebagai sumber air bersih bagi shelter tersebut.

c. Pemilihan instrumen analisis jaringan sarana dan prasarana di wilayah perencanaan sesuai dengan format data yang tersedia

Dalam memilih analisis jaringan sarana dan prasarana di wilayah perencanaan, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah menyesuaikan dengan format data yang tersedia. Analisis yang digunakan juga harus sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan.

d. Pemetaan jaringan sarana dan prasarana di wilayah perencanaan

Dalam memetakan jaringan sarana dan prasarana di wilayah perencanaan yaitu dengan membuat peta utilitas seperti: peta jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi dan sebagainya.

e. Analisis jaringan sarana dan prasarana wilayah

Dalam menganalisis jaringan sarana dan prasarana wilayah hal yang terpenting dan tidak boleh dilewati adalah ketelitian dan cermat serta menyusunya dengan komprehensif.

4.3.3. Analisis potensi pengembangan sumberdaya buatan

a. Penjelasan potensi pengembangan sumberdaya buatan terkait dengan perencanaan wilayah

Dalam menjelaskan potensi suatu pengembangan sumberdaya buatan terkait dengan perencanaan wilayah yaitu berdasarkan jenis struktur dan pola ruang serta intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya yang ada. Sebagai contoh adalah rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.

Kawasan jasa dalam hal ini meliputi:

- jasa keuangan, meliputi bank, asuransi, keuangan non bank dan pasar modal;
- jasa pelayanan, meliputi komunikasi, konsultan dan kontraktor;
- jasa profesi, meliputi pengacara, dokter dan psikolog;
- jasa perdagangan, meliputi ekspor-impor dan perdagangan berjangka; dan
- jasa pariwisata, meliputi agen dan biro perjalanan dan penginapan.

b. Penjelasan metode analisis potensi pengembangan sumberdaya buatan di wilayah perencanaan

Dalam menjelaskan metode analisis untuk mengembangkan suatu potensi sumberdaya buatan di wilayah perencanaan, bisa berdasarkan menggunakan permen PU no 41/PRT/M/2007 tentang pedoman kriteria teknis kawasan budidaya.

c. Pemilihan instrumen analisis potensi pengembangan sumberdaya buatan di wilayah yang tepat dan sesuai dengan format data yang tersedia

Dalam memilih instrumen analisis untuk potensi pengembangan sumberdaya buatan di wilayah perencanaan, maka yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan dengan format data yang tersedia.

- d. Pemetaan potensi pengembangan sumberdaya buatan di wilayah perencanaan
Dalam memetakan suatu potensi pengembangan sumberdaya buatan di wilayah perencanaan, maka yang harus dilakukan adalah teliti dan cermat mulai dari awal pembuatan peta hingga dalam menggunakan peta tersebut untuk suatu perencanaan. Misal, analisis potensi kawasan pertanian padi sawah yang paling sesuai.
- e. Analisis potensi pengembangan sumberdaya buatan
Sama halnya dengan poin sebelumnya, menganalisis potensi suatu pengembangan sumberdaya buatan dapat digunakan peta sebagai alat bantu, harus mengacu pada NSPK yang berlaku, dan disesuaikan dengan format yang tersedia. Hal terpenting yang tidak boleh terlupa adalah harus dilakukan dengan teliti dan cermat.

4.3.4. Analisis masalah pengembangan sumberdaya buatan

- a. Penjelasan masalah pengembangan sumberdaya buatan apa saja yang perlu dianalisis terkait dengan perencanaan wilayah
Sumber daya buatan adalah hasil pengembangan buatan dari sumber daya alam hayati atau non hayati yang ditunjuk untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan atau kemampuan daya dukungnya. Pengertian tersebut di atas menggambarkan bahwa sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang karena intervensi manusia telah berubah menjadi sumber daya buatan. Bentuk sumber daya buatan ini dapat dilihat pada kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, maupun kawasan cagar alam. Fungsi kawasan-kawasan tersebut dapat sebagai pelindung kelestarian lingkungan hidup, dibudidayakan, permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan manusia dan kesinambungan pembangunan.

Dalam menjelaskan masalah pengembangan sumberdaya buatan untuk perencanaan wilayah, maka hal yang perlu dianalisis adalah ruang lingkup dari pengembangan sumberdaya buatan dan fungsi dari sumberdaya buatan. Hal lain yang perlu dianalisis adalah NSPK yang berlaku.

- b. Pemilihan metode analisis masalah pengembangan sumberdaya buatan wilayah perencanaan
Dalam memilih metode analisis masalah pengembangan sumberdaya buatan wilayah perencanaan hal terpenting adalah mengacu pada NSPK yang berlaku seperti Permen PU no 41/PRT/M/2007 tentang pedoman kriteria teknis kawasan budidaya.
- c. Penyajian data dalam format yang sudah disediakan
Dalam menyajikan data, maka yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan format yang telah ada serta instrument yang terkait dalam. Lebih jauh, dalam menyajikan harus teliti dan cermat.

- d. Pemetaan masalah pengembangan sumberdaya buatan di wilayah perencanaan

Dalam memetakan masalah pengembangan sumberdaya buatan di wilayah perencanaan yang paling terpenting adalah analisis mengapa suatu wilayah tersebut terindikasi memiliki masalah. Hal ini dapat dilihat dari struktur dan pola ruang yang ada. Lebih jauh, dalam memetakan masalah pengembangan sumberdaya buatan harus mengacu pada NSPK yang berlaku.

- e. Pelaksanaan masalah pengembangan sumberdaya buatan di wilayah

Sama halnya dengan poin sebelumnya, dalam menganalisis masalah pengembangan sumberdaya buatan di wilayah mencakup tinjauan masalah masalah pengembangan sumberdaya buatan mengacu pada NSPK yang berlaku. Hal penting pada poin ini yaitum harus dilakukan dengan teliti dan cermat.

4.4. Analisis Sektoral

4.4.1. Analisis data sektor wilayah perencanaan

- a. Penjelasan kondisi masing-masing sektor di wilayah perencanaan han
Data sektor di wilayah perencanaan mencakup pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan jasa. Kondisi yang dijelaskan dari masing-masing sektor di wilayah perencanaan mencakup penggunaan lahan dari setiap sektor berdasarkan lokasi, ragam usaha dan intensitasnya.
- b. Pemetaan kondisi masing-masing sektor tersebut secara spasial
Kondisi masing-masing sektor wilayah perencanaan digambarkan secara spasial dalam bentuk peta.
- c. Pemilihan metode analisis yang tepat untuk menjelaskan kondisi masing-masing sektor di wilayah perencanaan
Metode analisis yang tepat untuk menjelaskan kondisi masing-masing sektor di wilayah perencanaan adalah analisis karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan.
- d. Analisis kondisi masing-masing sektor di wilayah perencanaan
Analisis kondisi masing-masing sektor di wilayah perencanaan harus dilakukan secara cermat.

4.4.2. Analisis kecenderungan pertumbuhan sektoral

- a. Pemilihan metode analisis yang menggambarkan kecenderungan pertumbuhan sektoral di wilayah perencanaan
Metode analisis yang tepat untuk menggambarkan kecenderungan pertumbuhan sektoral diwilayah perencanaan adalah analisis karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan.
- b. Penjelasan kecenderungan pertumbuhan sektoral di wilayah perencanaan

Arah kecenderungan pertumbuhan sektoral di wilayah perencanaan secara tepat didapatkan dari hasil analisis berdasarkan pemahaman akan wilayah studi.

- c. Keterkaitan kecenderungan pertumbuhan sektoral dengan kondisi fisik wilayah
Kecenderungan pertumbuhan sektoral dengan kondisi fisik wilayah memiliki keterkaitan dimana arah pertumbuhan sektoral telah mempertimbangkan batasan kondisi fisik wilayah.
- d. Pemetaan secara spasial kecenderungan pertumbuhan sektoral di wilayah perencanaan
Kecenderungan pertumbuhan sektoral di wilayah perencanaan digambarkan secara spasial dalam bentuk peta.

4.4.3. Analisis potensi dan masalah kondisi sektoral wilayah perencanaan

- a. Pemilihan metode analisis untuk menjelaskan potensi dan masalah kondisi masing-masing sektor
Metode analisis yang tepat untuk menjelaskan potensi dan masalah kondisi masing-masing sektor seperti telah dijelaskan pada poin sebelumnya, yaitu analisis karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan.
- b. Penjelasan potensi dan masalah kondisi sektoral wilayah perencanaan secara menyeluruh
Potensi dan masalah kondisi sektoral wilayah perencanaan secara menyeluruh dijelaskan dengan mendeskripsikan kondisi eksisting dan kemungkinan pengembangannya di masa depan.
- c. Analisis potensi dan masalah kondisi tiap sektor di wilayah perencanaan
Potensi dan masalah kondisi sektoral wilayah perencanaan dianalisis secara cermat.

4.5. Analisis Sosial Budaya

4.5.1. Analisis data kondisi sosial dan budaya wilayah perencanaan

- a. Penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi sosial dan budaya di wilayah perencanaan
Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi sosial dan budaya di wilayah perencanaan antara lain faktor kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, perumahan dan lingkungan, serta sosial dan budaya.
- b. Penjelasan kondisi sosial dan budaya daerah perencanaan

Kondisi sosial dan budaya daerah perencanaan dijelaskan berdasarkan factor-faktor yang telah disebutkan pada poin sebelumnya.

- c. Analisis kondisi sosial dan budaya wilayah perencanaan
Analisis kondisi sosial dan budaya wilayah perencanaan harus dilakukan secara cermat.

4.5.2. Analisis kecenderungan perkembangan penduduk dianalisis

- a. Penjelasan kondisi sebaran dan kepadatan penduduk, proporsi penduduk saat ini dan di masa yang akan datang
Kondisi sebaran, kepadatan penduduk, dan proporsi penduduk saat ini dan di masa yang akan datang dijelaskan berdasarkan unit analisis wilayah administrasi yang dilingkupi oleh wilayah perencanaan.
- b. Penjelasan potensi dan masalah kondisi sektoral wilayah perencanaan secara menyeluruh
Kecenderungan kondisi sebaran dan kepadatan penduduk di masa yang akan datang dijelaskan berdasarkan unit analisis wilayah administrasi yang dilingkupi oleh wilayah perencanaan.
- c. Analisis potensi dan masalah kondisi tiap sektor di wilayah perencanaan
Proporsi penduduk saat ini dan di masa yang akan datang (5, 10, 15 dan 20 tahun) dijelaskan dengan menerangkan laju pertumbuhan penduduk dan karakteristik khusus seperti kepadatan tertinggi dan terendah yang dimiliki oleh wilayah administrasi.

4.5.3. Analisis potensi dan masalah sosial dan budaya wilayah perencanaan

- a. Penjelasan potensi dan masalah sosial budaya di wilayah perencanaan
Seperti dijelaskan pada poin sebelumnya, dalam mengidentifikasi potensi dan masalah sosial budaya di wilayah perencanaan, maka yang harus dilakukan adalah melakukannya dengan teliti dan cermat.
- b. Penjelasan kualitas SDM di masa mendatang
Dalam menjelaskan kualitas SDM di masa mendatang, maka salah satunya dapat diukur dengan menghubungkan tingkat pendidikan penduduk dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja. Apakah keduanya berjalan sejalan (semakin tinggi tingkat SDM semakin tinggi penyerapan tenaga kerja), atau sebaliknya, tidak ada relevansinya.
- c. Pemetaan potensi dan masalah sosial budaya di wilayah perencanaan
Dalam memetakan potensi dan masalah sosial budaya di wilayah perencanaan, maka diperlukan matriks yang berisi potensi dengan masalah sosial yang ada.

4.6. Penyusunan Hasil Rencana

4.6.1. Kesimpulan hasil analisis

- a. Penentuan pokok-pokok hasil analisis dari isu strategis wilayah yang membentuk karakteristik wilayah

Dalam menentukan pokok-pokok hasil analisis dari isu strategis wilayah, maka yang harus disampaikan setidaknya mencakup gambaran umum wilayah dari aspek fisik dan lingkungan, sosial kependudukan, ekonomi, sarana umum dan utilitas kota

- b. Penyimpulan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah perencanaan

Dalam menyimpulkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup suatu wilayah perencanaan yang perlu dicermati adalah bagaimana keterkaitan jumlah penduduk dengan wilayah yang akan ditempatinya.

Berikut merupakan contoh perhitungan yang dilakukan oleh Bappenas Perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dilakukan melalui Pendekatan Jejak Ekologi:

Setiap manusia membutuhkan lahan untuk memenuhi kebutuhannya seperti untuk makan, perumahan, energi, transportasi, penyediaan air dan lain-lain.

Standar kebutuhan lahan adalah:

- Rata-rata dunia (baku) = 4,18 ha/kapita
- Standar indonesia (normal) = 0,780 ha/kapita
- Kebutuhan sangat sederhana = 0,256 ha/kapita

- c. Pemetaan secara spatial kecenderungan perkembangan kabupaten/ kota

Dalam memetakan secara spatial kecenderungan perkembangan kabupaten/ kota, pada dasarnya memperhatikan karakteristik wilayah perencanaan yang ada baik kondisi fisik maupun sosial. Sebagai contoh, disebelah utara kota memiliki tingkat keterlerangan yang tinggi, sedangkan di bagian selatan merupakan daerah yang lebih landai. Maka kecenderungan perkembangan wilayah akan mengarah keselatan kota (karena relatif landai). Kecenderungan pertumbuhan permukiman misalnya mendekati jaringan jalan, mendekati sungai, mendekati sumber air, mendekati sumber mata pencaharian, dan sebagainya.

- d. Penyimpulan hasil analisis isu strategis wilayah

Seperti dijelaskan pada poin-poin diatas, dalam menarik kesimpulan kan hasil analisis isu strategis wilayah, setidaknya mencakup aspek fisik dan lingkungan, sosial kependudukan, ekonomi, sarana umum dan utilitas kota. Hal terpenting yang ingin disampaikan pada poin ini yaitu dalam menarik kesimpulan untuk menghasilkan isu strategis wilayah, maka yang harus ditekankan adalah ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan prosedur yang ada.

4.6.2. Perumusan potensi wiayah

- a. Penentuan potensi-potensi terkait penataan ruang wilayah kabupaten/kota dari multi aspek yang berpengaruh

Dalam menentukan potensi-potensi suatu wilayah perencanaan (kabupaten/kota) terkait penataan ruang wilayah, maka yang harus dilakukan adalah menganalisisnya dengan pendekatan multi aspek. Setiap wilayah perlu mengidentifikasi dan menganalisis potensi wilayah terutama terkait keunggulan berbasis lokal. Hal ini disebabkan oleh:

- Setiap wilayah mempunyai potensi lokal yang unik, sehingga jika dimanfaatkan dapat membantu atau menghambat pengembangan ekonominya.
- Untuk membangun daya saing tiap wilayah diperlukan pemahaman dan tindakan yang didasarkan atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan agar wilayah tersebut dapat “bersaing” mapun bekerja sama dengan wilayah lainnya.

Lebih jauh, dalam mengidentifikasi suatu wilayah, maka dapat melihatnya dari kekuatan wilayah saat ini dan peluang pengembangannya seperti aspek fisik dan lingkungan, sosial kependudukan, ekonomi, sarana umum dan utilitas kota.

- b. Penjelasan rumusan potensi wilayah dengan masalah terkait penataan ruang

Aspek-aspek yang harus ada dalam merumuskan potensi suatu wilayah setidaknya mencakup hal berikut: kekuatan wilayah eksisting dan peluang pengembangan dari aspek fisik dan lingkungan, sosial kependudukan, ekonomi, sarana umum dan utilitas kota.

- c. Perumusan merumuskan potensi wilayah terkait penataan ruang

Seperti dijelaskan pada poin sebelumnya, dalam merumuskan potensi suatu wilayah perencanaan harus mengaitkan dengan penataan ruang yang ada. Hal yang menjadi poin penting adalah dalam merumuskan potensi suatu wilayah perencanaan, maka yang harus dilakukan yaitu dengan teliti dan cermat.

4.6.3. Perumusan isu strategis wilayah berdasarkan permasalahan dan potensi wilayah perencanaan

- a. Pemilihan isu strategis wilayah untuk dirumuskan sesuai dengan hasil analisis

Dalam memilih isu strategis suatu wilayah perencanaan, hal terpenting utama adalah identifikasi karakteristik wilayah tersebut, baik kondisi fisik maupun sosial. Setelah mengidentifikasi karakteristik wilayah tersebut, dapat diketahui permasalahan yang muncul sehingga dibutuhkan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan perencanaan. Kebijakan tersebut dapat berupa rencana tata ruang wilayah.

Berikut merupakan contoh kasus beberapa isu strategis yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan wilayah Provinsi Sumatera Barat ini diantaranya :

1. Bencana alam.

Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan gelombang tinggi telah menimbulkan korban dan kerusakan di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini terkait dengan letak geografis Provinsi Sumatera Barat yang berpotensi terjadinya bencana alam. Gempa bumi terkait dengan kondisi geologi yang berada pada gugus Bukit Barisan dan gunung berapi aktif. Selain itu wilayah Provinsi Sumatera Barat juga terletak pada jalur Patahan Sumatera dan lempeng benua yang rawan terjadinya gempa bumi dan berpotensi terjadinya tsunami.

2. Keterpaduan pemanfaatan ruang dengan provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan pemanfaatan ruang terutama pola ruang dan prasarana lintas wilayah sehingga tercipta satu kesatuan antar wilayah. Untuk wilayah provinsi Sumatera Barat keterpaduan pola ruang terutama menyangkut fungsi kawasan lindung lintas wilayah seperti Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang mencakup wilayah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Demikian juga adanya WS/DAS lintas wilayah provinsi seperti WS/DAS Batanghari yang meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Dengan demikian dibutuhkan keterpaduan penataan ruangnya.

3. Sumatera Barat memiliki kultur Minangkabau, dikenal sebagai penganut agama Islam yang kuat dan teguh dengan adat dan tradisi.

Falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai” adalah jati diri masyarakat Minangkabau yang menunjukkan keseimbangan hidup antara agama dan budaya. Islam memberikan sistem bagi prinsip kehidupan yang agamais, sementara sistem adat merupakan implementasi Syara’ dalam kehidupan sosial budaya di ranah minang. Mengakomodir konsep filosofis ini dan didorong oleh semangat otonomi, Pemerintah Daerah Sumatera Barat semenjak tahun 2000 telah mencanangkan program “Kembali ke Nagari” dan “Kembali ke Surau” dengan dikeluarkannya Perda Nomor 9 Tahun 2000 dan direvisi oleh Perda Nomor 2 Tahun 2007. Pelaksanaan kedua program tersebut secara umum telah berjalan dan pada tahun 2006 telah terdapat 520 nagari yang secara resmi berada dalam struktur pemerintahan. Kembali ke Nagari berimplikasi kepada revitalisasi budaya dan adat Minangkabau. Sementara itu Kembali ke Surau berimplikasi kepada aktualisasi nilai-nilai syara’ secara komprehensif (Sumber: Sistem Informasi Penataan Ruang Sumatera Barat)

- b. Penjelasan isu strategis dan tantangan terkait penataan ruang wilayah kabupaten/kota dari multi aspek yang berpengaruh

Dalam menjelaskan isu strategis dan tantangan terkait penataan ruang wilayah kabupaten/kota harus berdasarkan pendekatan dari multi aspek yang mempengaruhi permasalahan suatu wilayah perencanaan. Seperti contoh diatas, diketahui wilayah Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa merupakan kawasan rawan bencana, hal ini dikarenakan secara geografis wilayah tersebut berada pada gugus Bukit Barisan dan gunung berapi aktif. Selain itu wilayah Provinsi Sumatera Barat juga terletak pada jalur Patahan Sumatera dan lempeng benua yang rawan terjadinya gempa bumi dan berpotensi terjadinya tsunami. Lebih jauh, hal ini didukung banyaknya penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana sehingga kebijakan rencana tata ruang harus tepat guna menghindari kerugian dari dampak bencana tersebut.

- c. Perumusan isu strategis wilayah berdasarkan permasalahan dan potensi wilayah perencanaan

Seperti dijelaskan pada poin sebelumnya, bahwa dalam merumuskan isu strategis harus menggunakan pendekatan multi aspek dengan cara berpikir menyeluruh (*holistic*). Isu strategis harus memperhatikan permasalahan yang ada, lalu melihat seberapa besar potensi wilayah perencanaan tersebut. Dalam poin ini yang ditekankan adalah saat merumuskan isu strategis maka harus teliti dan cermat agar menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

4.7. Menguraikan Kebutuhan Pengembangan

4.7.1. Perumusan laju perkembangan wilayah

- a. Penjabaran laju perkembangan wilayah berdasarkan hasil analisis berdasarkan multi aspek

Dalam mendeskripsikan laju perkembangan suatu wilayah, maka analisis yang digunakan berdasarkan perspektif multi aspek. Aspek-aspek tersebut mencakup laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, kebutuhan infrastruktur dan daya tampung. Hal-hal tersebut dijabarkan sesuai pendekatan (perspektif) masing-masing, lalu dikaitkan dengan isu perkembangan wilayah yang ada. Misalnya ketika ada isu kemiskinan di suatu wilayah, maka pendekatan yang digunakan bukan hanya satu pendekatan ekonomi saja, tetapi juga pendekatan kebutuhan infrastruktur. Dalam hal ini kemiskinan, bukan saja masalah pendapatan dan kesenjangan, tetapi terkait akses untuk memperoleh kesejahteraan.

- b. Pemilihan metode analisis laju perkembangan wilayah

Dalam menganalisis laju perkembangan wilayah, maka hal yang perlu diperhatikan adalah ketika memilih metode analisis laju perkembangan wilayah, seperti analisis laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, kebutuhan infrastruktur, dan analisis daya dukung dan daya tampung.

Contoh kasus, dalam menghitung daya dukung wilayah terhadap Daya Dukung Wilayah Dan Potensi Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit Di Kabupaten Bengkalis (Nasrul dan Syahja, 2007), menggunakan metode perhitungan yakni perhitungan dengan hanya memperhatikan tanaman yang menghasilkan dan perhitungan dengan memasukkan tanaman yang belum menghasilkan (belum produksi). Dari hasil studi tersebut, terdapat perbedaan dari hasil perhitungan kedua metode tersebut. DDW tanaman menghasilkan sebesar 3,771, sedangkan angka DDW tanaman belum menghasilkan mencapai 5,971.

Dari kasus tersebut dapat dipelajari bahwa, dengan metode perhitungan yang berbeda, maka memungkinkan adanya hasil perhitungan yang berbeda. Maka hal yang menjadi poin penting ketika memilih metode adalah memilih sesuai dengan tujuan suatu pengembangan wilayah.

- c. Perumusan laju perkembangan wilayah
Seperti pada poin-poin sebelumnya, dalam merumuskan laju perkembangan wilayah, maka setidaknya mencakup aspek kependudukan, perekonomian, infrastruktur, dan daya tampung wilayah. Hal penting yang ditekankan pada poin ini yaitu dalam merumuskan laju perkembangan wilayah berdasarkan aspek-aspek tersebut dengan teliti dan cermat.

4.7.2. Perhitungan proyeksi kebutuhan pengembangan

- a. Penjelasan kebutuhan pengembangan apa saja yang perlu dihitung
Dalam menghitung suatu kebutuhan pengembangan, ada beberapa hal yang menjadi poin penting untuk dihitung. Poin-poin penting tersebut setidaknya mencakup hal berikut ini:
 - Distribusi dan Kepadatan Penduduk
 - Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
 - Jumlah Sarana dan Prasarana Umum
 - Kebutuhan Penyediaan Utilitas Kota
- b. Pemilihan metode untuk menghitung proyeksi kebutuhan pengembangan struktur ruang (sistem perkotaan dan sistem prasarana) sesuai analisis faktor peluang dan tantangan wilayah yang sudah ditentukan
Dalam memilih metode untuk menghitung proyeksi kebutuhan pengembangan, struktur ruang (sistem perkotaan dan sistem prasarana) sesuai analisis faktor peluang dan tantangan wilayah yang sudah ditentukan.
- c. Perhitungan proyeksi kebutuhan pengembangan
Dalam melakukan proyeksi kebutuhan pengembangan, maka hal-hal yang menjadi poin penting untuk hal tersebut antara lain: menggunakan metode perhitungan proyeksi yang tepat, menghitung berdasarkan pada analisis

SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Treatment), serta mengacu pada kebutuhan pengembangan di wilayah perencanaan.

4.7.3. Perumusan skenario pengembangan wilayah

- a. Perumusan skenario pengembangan wilayah berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan pengembangan

Dalam merumuskan skenario pengembangan wilayah, maka hal yang perlu dilakukan adalah menghitung berdasarkan proyeksi kebutuhan suatu pengembangan. Skenario tersebut dapat mengacu pada skenario perkembangan ekonomi, melalui simulasi untuk mendekati kemungkinan kinerja perekonomian di masa yang akan datang, dengan mengoptimalkan potensi wilayah.

Misalnya suatu kasus perencanaan wilayah di Kabupaten Lampung Tengah menggunakan skenario perkembangan perekonomian melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi moderat. Basis perekonomian Kabupaten Lampung Tengah yang didominasi oleh sektor primer dan sekunder. Penguatan pada sektor primer ini sangat utama sebagai pendukung utama kegiatan perekonomian Kabupaten Lampung Tengah.

Hasil analisis secara eksternal, menunjukkan bahwa sektor basis Kabupaten Lampung Tengah terutama sektor pertanian yang paling rawan terhadap ancaman dari kabupaten/kota lainnya di Propinsi Lampung. Ancaman tingkat pergeseran sektor pertanian ini mencapai t Rp. 44.763,72 juta, sedangkan ancaman untuk mencapai sasaran pengembangan wilayah di Kabupaten Lampung Tengah, maka salah satu skenario pengembangan wilayahnya adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat kedudukan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Wilayah Produksi Utama di Propinsi Lampung

- a. Potensi Produksi Pertanian Lahan Basah dan Lahan Kering yang menghasilkan komoditi padi dan ubi kayu di tingkatkan kemampuan produktivitasnya untuk memperlegas jaiak dengan kabupaten lainnya.
- b. Rencana pengembangan luas lahan pertanian lahan kering dan lahan basah disesuaikan dengan tingkat kesesuaian lahan untuk mengefisienkan penggunaan lahan produktif.
- c. Perkuatan dan pengembangan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan bedagsung selama 3 tahun rencana.
- d. Indikator pencapaian pada tahap ini adalah tercapainya swasembada pada tingkat propinsi artinya tingkat produksi pertanian dihasilkan oleh Kabupaten Lampung Tengah. (Sumber: RTRW Kab. Lampung Tengah)

- b. Penjelasan pokok-pokok skenario pengembangan wilayah

Dalam menjelaskan pokok-pokok skenario pengembangan wilayah, maka harus menyusun berdasarkan tujuan dari pengembangan wilayah tersebut dengan tepat. Tujuan yang dimaksud adalah target-target yang ingin dicapai pada setiap periode tahapan pengembangan wilayah.

Berikut merupakan contoh Target Kerja Tahunan dari Bappeko Surabaya Rencana dari capaian target tahunan beserta program untuk mencapainya

PROGRAM	TAHUN 2006		TAHUN 2007		TAHUN 2008	
	KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	TARGET
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (P-1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya 2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 	<ul style="list-style-type: none"> - RKPD Kota Surabaya Tahun 2007 yang dilengkapi Peraturan Walikota - KUA Tahun Anggaran 2007 yang dilengkapi Nota Kesepakatan antara Walikota dengan Pimpinan DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2. Penyusunan KUA 	<ul style="list-style-type: none"> - RKPD Kota Surabaya Tahun 2008 yang dilengkapi Peraturan Walikota - (i) KUA TA 2008; dan (ii) KUA Perubahan TA 2007, yang masing-masing dilengkapi Nota Kesepakatan antara Walikota dengan Pimpinan DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2. Penyusunan KUA 	<ul style="list-style-type: none"> - RKPD Kota Surabaya Tahun 2009 yang dilengkapi Peraturan Walikota - (i) KUA TA 2009; dan (ii) KUA Perubahan TA 2008, yang masing-masing dilengkapi Nota Kesepakatan antara Walikota dengan Pimpinan DPRD

Gambar 4. 1 Contoh Rencana Kerja Tahunan Beserta Capaian Tiap Tahunnya
(Sumber: Bappeko Surabaya)

- c. Penguraian skenario pengembangan wilayah berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan pengembangan
Seperti dijelaskan pada poin sebelumnya, dalam menguraikan skenario pengembangan wilayah maka yang harus dilakukan adalah menghitung berdasarkan proyeksi kebutuhan pengembangan dengan teliti dan cermat.

BAB V

SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI

5.1 Sumber Daya Manusia

5.1.1 Instruktur

Instruktur dipilih karena dia telah berpengalaman. Peran instruktur adalah untuk :

- 1) Membantu peserta untuk merencanakan proses belajar.
- 2) Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar.
- 3) Membantu peserta untuk memahami konsep dan praktek baru dan untuk menjawab pertanyaan peserta mengenai proses belajar.
- 4) Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar.
- 5) Mengorganisir kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.
- 6) Merencanakan seorang ahli dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.

5.1.2 Penilai

Penilai melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk penilaian di tempat kerja. Penilai akan :

- 1) Melaksanakan penilaian apabila peserta telah siap dan merencanakan proses belajar dan penilaian selanjutnya dengan peserta.
- 2) Menjelaskan kepada peserta mengenai bagian yang perlu untuk diperbaiki dan merundingkan rencana pelatihan selanjutnya dengan peserta.
- 3) Mencatat pencapaian / perolehan peserta.

5.1.3 Teman kerja / sesama peserta pelatihan

Teman kerja /sesama peserta pelatihan juga merupakan sumber dukungan dan bantuan. Peserta juga dapat mendiskusikan proses belajar dengan mereka. Pendekatan ini akan menjadi suatu yang berharga dalam membangun semangat tim dalam lingkungan belajar/kerja dan dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta.

5.2 Sumber-sumber Kepustakaan (Buku Informasi)

5.2.1 Sumber pustaka penunjang pelatihan

Pengertian sumber-sumber adalah material yang menjadi pendukung proses pembelajaran ketika peserta pelatihan sedang menggunakan materi pelatihan ini.

Sumber-sumber tersebut dapat meliputi :

- Buku referensi (text book)/ buku manual servis
- Lembar kerja
- Diagram-diagram, gambar
- Contoh tugas kerja
- Rekaman dalam bentuk kaset, video, film dan lain-lain.

Ada beberapa sumber yang disebutkan dalam pedoman belajar ini untuk membantu peserta pelatihan mencapai unjuk kerja yang tercakup pada suatu unit kompetensi.

Prinsip-prinsip dalam pelatihan Berbasis Kompetensi mendorong kefleksibilitas dari penggunaan sumber-sumber yang terbaik dalam suatu unit kompetensi tertentu, dengan mengizinkan peserta untuk menggunakan sumber-sumber alternatif lain yang lebih baik atau jika ternyata sumber-sumber yang direkomendasikan dalam pedoman belajar ini tidak tersedia/tidak ada.

5.2.2 Sumber-sumber bacaan yang dapat digunakan:

Judul : Urban Land Use Planning
Pengarang : Kaiser, Edward J. et.al (ed),
Penerbit : University of Illinois Press, Urbana.
Tahun terbit : 1995

Judul : Urban & Regional Economics
Pengarang : McCann Paul
Penerbit : Oxford University Press.
Tahun terbit : 2001

Judul : Fundamentals of Spatial Information Systems
Pengarang : Robert Laurini and Derek Thompson
Penerbit : Academic Press
Tahun terbit : 1995

5.3 Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan

5.3.1 Peralatan yang digunakan:

- 1)Komputer/ *notebook*
- 2)Proyektor
- 3) Software untuk pengolahan data
- 4)Printer

5.3.2 Bahan yang dibutuhkan:

- 1) Data analisa kebutuhan hasil identifikasi awal perencanaan;
- 2) Data hasil survey –primer dan sekunder- dengan jenis data spasial dan data non-spasial;

- 3) Data dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah perencanaan (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RTR KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait) meliputi data spasial dan data non-spasial;
- 4) Data dan peta profil wilayah perencanaan meliputi wilayah administrasi dan geografis, iklim dan hidro oseanografi, geologi dan geomorfologi, ekosistem, sumberdaya, demografi dan sosial budaya
- 5) Data dan peta mengenai daya dukung lingkungan dan perencanaan, konservasi dan bencana dan kewenangan dan pengelolaan lahan di wilayah perencanaan dengan jenis data spasial dan data non-spasial;
- 6) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang;